

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 41 TAHUN 2024

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 - 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 981);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon ((Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023 - 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
6. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG.
7. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan SPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan

melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

14. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
15. Tim Driver adalah lembaga yang terdiri dari BAPPELITBANGDA,DPPKBP3A, BKAD dan Inspektorat yang selanjutnya disebut Tim Driver adalah wadah yang dibentuk sebagai Penggerak/Motor bagi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.
16. Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.
17. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai PD dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2023 - 2025 adalah :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra PD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada PD/unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;

Pasal 4

Tujuan penetapan RAD PUG adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun 2024 - 2029 agar pelaksanaan tugas dan fungsi (Pokja PUG) dapat berjalan

lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 5

- (1) RAD PUG Tahun 2023 - 2025 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pemantauan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2023 - 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian Pengarusutamaan Gender di daerah.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) RAD PUG Tahun 2023 - 2025 disusun dengan sistematika Sebagai berikut:
 - a. Rencana Aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - b. Penanggung jawab, yang memuat Perangkat Daerah dan /atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
 - c. Instansi Terkait, yang memuat intansi / kelompok kerja/tim yang terkait dalam mendukung dan mengkoordinasikan terhadap pelaksaaan dan pencapaian aksi tersebut;
 - d. Kriteria Keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. ukuran Keberhasilan, yang memuat keluaran yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. Ukuran Keberhasilan B03, 806, B09 dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian keluaran Ukuran Keberhasilan;
 - g. Persentase Capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (self assessment); dan
 - h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.

- (2). RAD PUG Tahun 2023 - 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2023 - 2025 dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2024

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 2 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMI RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 41 TAHUN 2024
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 - 2025

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023 - 2025

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	CAPAIAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

I. PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG

Terbentuknya Wadah Konsultasi Bagi Pelaksana dan Penggerak Pengarusutamaan Gender dari Berbagai Instansi/Lembaga di Kabupaten Cirebon

Penyusunan Kelembagaan PUG	Bapelitbangda Kabupaten Cirebon	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon	Tersusunnya kelembagaan PUG sesuai dengan regulasi yang ada	Ditetapkannya Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG)	Penyusunan dan penetapan SK Pokja PUG sesuai dengan struktur SKPD dalam Perda Nomor 12 Tahun 2024	100%	
Penetapan Rencana Kerja Tahunan Pokja PUG Tahunan	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cirebon	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terwujudnya Pola Kerja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	Penyusunan dan penetapan rancangan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - 2029	62%	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	CAPAIAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

II. SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender Pokja PUG.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.	Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cirebon	Kelompok Kerja PUG memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada Kelompok Kerja PUG.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender; - Sosialisasi PUG pada seluruh anggota Kelompok Kerja PUG. 	78%	
--	---	---	---	---	--	-----	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	CAPAIAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

III. IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)

Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan di Daerah

Publikasi Profil Gender Kabupaten Cirebon.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Penyusun Buku Data Terpilih Gender Kabupaten Cirebon; - Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon; 	<ul style="list-style-type: none"> - Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Cirebon; 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersediannya Informasi/ Data yang Terpilih antara Laki-laki dan Perempuan dalam Dokumen Data Daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi Data/ Informasi yang akandipublikasikan dalam Buku Profil Gender Kabupaten Cirebon; - Pengumpulan Data/ Informasi yang Terpilih yang Akan di Publikasikan dalam Profil Gender Kabupaten Cirebon; - Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Cirebon; - Dipublikasikannya Buku Profil Gender Kabupaten Cirebon dalam Website Pemerintah Daerah; 	85%	
--	---	---	--	--	---	-----	--

Pelatihan Penyusunan GAP dan GBS	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Kerja Pengarusutaman Gender (PUG). 	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok Kerja PUG Mahir Melakukan Analisa GAP dan GBS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksanannya Pelatihan Penyusunan GAP dan GBS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Konsep Pelaksanaan Pelatihan Prnyusunan GAP dan GBS oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG; - Pelaksanaan Pelatihan Anggota Pokja PUG 	18%	
--	---	---	---	--	--	-----	--

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD di Kabupaten Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> - Tim TAPD Kabupaten Cirebon; - Inspektorat Kabupaten Cirebon; - Pokja PUG Kabupaten Cirebon. 	Anggota Pokja PUG pada 33 SKPD yang Telah Mendapat Pelatihan Penyusunan GAP dan GBS	Terwujudnya Kesetaraan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan di Kabupaten Cirebon	<p>Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/ DPA SKPD pada Website Pemerintah Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan/Program Kegiatan Utama yang Dimasukan dalam PPRG (Tim Teknis) - Rapat dengan TAPD untuk Sosialisasi Mekanisme GAP dan GBS dalam Siklus Anggaran; - Penelaahan Gender Analysis Pathway (GAP) oleh Tim Teknis/ Sekretariat PPRG terhadap RKA/ DPA SKPD; - Penyusunan Badget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD; 	72%	

- | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | - Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD pada Website Pemerintah Daerah. | | |
|--|--|--|---|--|--|
- Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD pada Website Pemerintah Daerah.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

IV. OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

Terwujudnya Kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan Sesuai dengan Kondisi dan Tantangan yang Dihadapi dan Tepat Sasaran

Pemantauan Pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten Cirebon.	Kelompok Kerja Pengarutamaan Gender (PUG) Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> - Bapelitbangda Kabupaten Cirebon; - Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Inspektorat Kabupaten Cirebon. 	Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan Kepada Kepala Daerah.	Tersediannya Hasil Evaluasi Pelaksanaan PUG di Kabupaten Cirebon sebagai bahan Perumusan Kebijakan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Instrumen Pemantauan PUG di Kabupaten Cirebon; - Rapat Pemantaun dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan Melibatkan Seluruh SKPD pada Triwulan I –III. - Rekoemndasi Kebijakan Kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah 	45% 100%	
---	--	--	---	---	---	-----------------	--

Diundangkan di Sumber pada tanggal

2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

BUPATI CIREBON,

ttd

HILMI RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

IMRON

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 41 TAHUN 2024

**TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN CIREBON TAHUN
2023 – 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Walaupun Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995, namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, control dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan serta merasa manfaat pembangunan di semua bidang dan pada semua tingkatan dari desa sampai pusat.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengarusutamaan di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Hal ini dimaksudkan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggung jawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Cirebon secara komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) berisi apa yang harus dilakukan oleh siapa dengan cara bagaimana, dan output/outcomenya apa sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monev pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) di Kabupaten/Kota/Provinsi Jawa Barat.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Cirebon adalah :

1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender .
2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring–evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunan.
3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi karena adanya indikator yang terukur .
4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi baik di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengimplementasikan strategi PUG.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan Penyusunan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Proses Penyusunan

1.5. Pengguna

BAB II. ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

- 2.1. Pendidikan
- 2.2. Kesehatan
- 2.3. Ekonomi
- 2.4. Sosial
- 2.5. Sektor Publik

BAB III. RENCANA AKSI

- 3.1. Isu Strategis
- 3.2. Tujuan
- 3.3. Sasaran
- 3.4. Kebijakan
- 3.5. Strategi

BAB IV. MATRIKS RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

1.4. Proses Penyusunan

Proses menyusunan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender adalah :

- 1) Membentuk tim penyusun Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender.
- 2) Tim membuat kuisioner untuk mendapatkan informasi dari SKPD dan pokja Gender Kabupaten Cirebon baik data primer maupun sekunder.
- 3) Tim mengumpulkan data terpilah.
- 4) Data terpilah ditabulasi
- 5) Data dianalisis dengan menggunakan analisis gender.
- 6) Mengkaji isu-isu strategis di Kabupaten Cirebon.
- 7) Membuat Rancangan Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Cirebon.
- 8) Diseminasi dalam Rencana Aksi Daerah di Kabupaten Cirebon.
- 9) Finalisasi RAD PUG di Kabupaten Cirebon.

1.5. Pengguna

Pengguna Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah seluruh stakeholder pemerintah/ non pemerintah, yang meliputi para perencana, pelaksana, serta tim monitoring dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Cirebon.

BAB II

ANALISA SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

2.1. PENDIDIKAN

Bidang pendidikan merupakan bidang yang perlu ditingkatkan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pendidikan di Indonesia telah diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa "Setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran" Artinya setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang sama tanpa memandang status sosial , status ekonomi, suku bangsa, etnis, agama, gender dan geografis.

Sistem Pendidikan Nasional telah diatur dalam Undang-Undang No mor 20 tahun 2003 . Dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan , bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Kemudian pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang dimaksud menyebutkan bahwa setiap warga Negara dengan yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/sederajat dan SMP/ sederajat). Tujuan aturan-aturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia walaupun kenyataannya tujuan tersebut belumdapat dicapai karena orang masih melihat status social, gender dan status ekonomi.

II.1 Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi perlu diketahui agar kegiatan dimaksud disukai masyarakat atau tidak. Semakin besar angka partisipasi masyarakat pada program pendidikan maka program, lembaga, maka daerah tersebut berkualitas begitupun sebaliknya.

Rasio jumlah siswa belum cukup menggambarkan kesetaraan gender di bidang pendidikan, sehingga diperlukan indicator yang bias digunakan untuk mengukur kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Salah satu indikatornya adalah Angka Partisipasi Kasar.

Angka Partisipasi Kasar atau APK merupakan perbandingan antara jumlah murid pada tingkat pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk yang berusia pada tingkat pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu di wilayah terentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Ada perbedaan pencapaian APK antar laki-laki dan perempuan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel : 2.1

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut jenjang pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Waled	227.46	79.90	119.96	74.16	94.55	82,91	51,57	76,34	62,20
2	Ciledug	231.84	67.26	105.48	70.67	97.37	82,08	54,07	75,44	63,20
3	Losari	227.07	124.98	162.43	79.92	110.47	92,94	59,84	91,41	73,29
4	Babakan	225.23	74.01	113.43	164.91	104.51	126,72	91,01	116,69	107,24

5	Karangsembung	205.38	61.02	95.16	186.25	118.11	143,11	157,34	90,81	115,23
6	Lemahabang	261.20	70.44	112.82	135.05	73.72	96,25	105,05	55,61	73,78
7	Sedong	227.17	56.58	91.82	41.16	91.13	56,46	28,01	70,39	40,99
8	Astanajapura	218.84	112.68	152.04	103.97	154.88	123,68	44,81	218,78	112,17
9	Mundu	242.06	82.57	126.42	62.11	103.70	78,35	53,53	78,19	63,16
10	Beber	234.91	59.55	95.31	92.73	86.31	89,48	81,83	66,31	73,97
11	Sumber	262.13	77.00	122.14	91.59	97.22	94,34	64,89	82,77	73,64
12	Palimanan	223.01	67.29	104.25	224.92	161.31	188,40	139,30	163,97	153,46
13	Plumbon	220.96	70.42	110.01	62.15	84.28	71,57	74,01	40,97	59,93
14	Weru	228.72	66.08	105.39	143.91	123.62	133,34	120,61	96,69	108,16
15	Kapetakan	240.34	83.09	125.94	66.14	95.13	77,42	54,33	74,34	62,12
16	Klangenan	226.99	66.39	104.69	342.91	42.67	79,97	263,81	31,50	60,36
17	Arjawinangun	234.78	92.60	135.03	92.96	117.91	104,12	69,79	101,55	84,00
18	Ciwariningin	208.56	45.85	76.22	230.82	186.34	206,45	94,66	234,03	171,02
19	Susukan	206.85	77.18	113.14	44.03	73.72	55,16	46,60	43,42	45,41
20	Gegesik	224.67	94.26	134.94	90.44	88.43	89,39	66,26	74,98	70,84
21	Susukanlebak	214.90	47.63	78.23	133.09	119.86	126,02	65,10	145,57	108,07
22	Pabedilan	214.86	64.47	101.99	120.84	88.19	102,30	65,15	98,40	84,03
23	Dukupuntang	237.03	89.84	132.54	66.03	199.40	97,78	41,01	213,39	82,05
24	Panguragan	199.68	72.88	108.85	55.70	77.43	64,84	40,58	59,46	48,52
25	Kaliwedi	208.83	52.98	86.64	52.99	83.30	64,53	33,47	86,54	53,68
26	Pangenan	221.66	71.39	111.50	87.18	126.47	103,28	54,46	122,61	82,38
27	Gebang	208.68	66.69	103.29	63.60	87.81	73,73	41,60	74,89	55,53
28	Depok	207.91	78.27	115.17	78.65	108.87	90,78	55,70	109,12	77,14
29	Kedawung	163.20	74.60	104.90	40.70	80.34	53,39	28,39	70,32	41,81
30	Karangwareng	212.69	50.49	85.11	54.51	33.67	42,52	45,12	27,65	35,07
31	Talun	213.05	71.10	109.07	81.18	39.24	52,89	59,05	32,45	41,11
32	Gunungjati	172.06	95.32	123.38	159.81	74.25	101,95	127,45	66,21	86,04
33	Pasaleman	219.60	60.20	96.31	96.92	45.24	61,69	77,88	40,31	52,26
34	Pabuaran	204.99	70.09	106.01	115.04	118.62	116,86	47,55	155,16	102,31
35	Tengahtani	210.24	69.19	107.06	149.60	36.51	60,00	119,89	29,35	48,15
36	Plered	259.84	75.69	120.89	300.00	68.78	113,76	262,36	61,83	100,84
37	Gempol	211.96	72.52	111.98	153.10	92.92	117,47	110,06	82,74	93,89
38	Greged	258.46	81.66	128.22	46.20	118.05	68,69	43,64	85,77	56,83
39	Suranenggala	208.20	81.84	119.73	259.39	97.28	141,35	181,69	95,35	118,83
40	Jamblang	227.93	79.72	121.06	126.58	85.24	101,22	96,68	64,61	77,01

II.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu. Dengan demikian, kalau kita ambil contoh jenjang pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) maka dapat ditarik pemahaman bahwa APM SD merupakan perbandingan antara jumlah murid SD dan setara umur 7 - 12 tahun dan jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun secara keseluruhan.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, bahwa Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD, SLTP DAN SLTA. Sebagai berikut., pada tingkat SD APM sebesar 99,98% mengenyam pendidikan SD, sedangkan pada tingkat SLTP 78,97% dan SLTA 85,31%. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel : 2.2

Angka Partisipasi Murni menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Waled	204,44	71,07	107,28	51,57	76,34	62,20	40,36	75,28	59,26
2	Ciledug	211,73	60,35	95,51	54,07	75,44	63,20	145,20	70,30	90,12
3	Losari	204,72	112,14	146,11	59,84	91,41	73,29	69,66	77,47	73,53
4	Babakan	194,10	63,74	97,73	91,01	116,69	107,24	78,01	82,77	80,61
5	Karangsembung	185,79	53,72	84,95	157,34	90,81	115,23	2,03	9,38	3,33
6	Lemahabang	236,27	63,09	101,57	105,05	55,61	73,78	87,31	192,00	125,87
7	Sedong	209,00	52,47	84,80	28,01	70,39	40,99	21,13	79,65	27,76
8	Astanajapura	201,77	104,02	140,26	44,81	218,78	112,17	265,43	179,45	217,38
9	Mundu	224,35	76,11	116,87	53,53	78,19	63,16	58,07	153,56	71,45
10	Beber	210,46	53,36	88,09	81,83	66,31	73,97	46,20	75,80	60,48
11	Sumber	233,93	67,94	108,41	64,89	82,77	73,64	122,46	113,00	118,61
12	Palimanan	201,19	59,08	92,81	139,30	163,97	153,46	64,53	259,13	114,41
13	Plumbon	202,27	64,59	100,80	74,01	40,97	59,93	99,54	149,13	123,78
14	Weru	209,28	60,14	96,19	120,61	96,69	108,16	120,54	152,40	134,05
15	Kapetakan	214,42	75,38	113,27	54,33	74,34	62,12	6,50	3,75	5,31
16	Klangenan	199,09	57,37	91,17	263,81	31,50	60,36	3,92	10,82	5,50
17	Arjawinangun	211,65	82,47	121,02	69,79	101,55	84,00	40,01	176,99	73,77
18	Ciwaringin	184,75	40,02	67,03	94,66	234,03	171,02	66,55	349,65	123,81
19	Susukan	186,15	68,09	100,83	46,60	43,42	45,41	109,42	130,84	118,77
20	Gegesik	203,55	85,31	122,20	66,26	74,98	70,84	63,17	209,56	95,29
21	Susukanlebak	200,00	44,34	72,82	65,10	145,57	108,07	38,19	40,81	39,62
22	Pabeledilan	191,97	58,60	91,87	65,15	98,40	84,03	67,17	89,58	80,40
23	Dukupuntang	220,12	81,41	121,66	41,01	213,39	82,05	64,47	236,94	105,29
24	Panguragan	179,89	65,99	98,30	40,58	59,46	48,52	16,73	124,36	31,87
25	Kaliwedi	192,94	47,43	78,86	33,47	86,54	53,68	30,65	54,39	37,06
26	Pangenan	208,22	64,87	103,13	54,46	122,61	82,38	34,06	25,61	29,45
27	Gebang	190,56	60,22	93,81	41,60	74,89	55,53	149,05	41,77	70,38
28	Depok	186,88	70,52	103,64	55,70	109,12	77,14	52,83	230,66	83,16
29	Kedawung	151,50	68,55	96,92	28,39	70,32	41,81	279,23	402,47	337,10
30	Karangwareng	203,29	47,05	80,40	45,12	27,65	35,07	69,81	91,78	84,19
31	Talun	197,00	64,86	100,20	59,05	32,45	41,11	0,89	2,96	1,24
32	Gunungjati	161,30	85,74	113,36	127,45	66,21	86,04	22,45	175,63	37,26
33	Pasaleman	190,46	52,80	83,99	77,88	40,31	52,26	14,89	13,21	14,04
34	Pabuaran	181,97	59,89	92,39	47,55	155,16	102,31	268,80	115,20	198,13
35	Tengahtani	193,95	62,41	97,72	119,89	29,35	48,15	22,67	11,68	17,80
36	Plered	231,89	67,34	107,73	262,36	61,83	100,84	28,91	54,82	30,76
37	Gempol	192,41	65,01	101,06	110,06	82,74	93,89	12,16	5,65	8,09

38	Grged	243,27	75,90	119,98	43,64	85,77	56,83	22,86	38,23	30,21
39	Suranenggala	188,37	71,70	106,68	181,69	95,35	118,83	34,32	43,55	38,32
40	Jamblang	202,47	72,09	108,46	96,68	64,61	77,01	216,33	191,06	203,16
	Rata-rata	201,46	66,06	99,98	66,67	89,07	78,97	62,81	119,83	85,31

II.3 Angka Melek Huruf

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam mengimbangi lajunya ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang semakin pesat, oleh karena itu perlu diimbangi dengan kemampuan baca tulis. Indikator yang mengukur kemampuan baca tulis adalah Angka Melek Huruf atau AHM.

Berdasarkan hasil pendataan tahun 2023 dari BPS Kabupaten Cirebon, Angka Melek Huruf di Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel : 2.3

Angka Melek Huruf (AHM) di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Angka Melek Huruf (AMH)	
		Angka	Indeks
1	2	3	4
1	Waled	92.60	92.60
2	Pasaleman	89.19	89.19
3	Ciledug	97.24	97.24
4	Pabuaran	94.19	94.19
5	Losari	91.97	91.97
6	Pabedilan	90.15	90.15
7	Babakan	90.99	90.99
8	Gebang	88.82	88.82
9	Karangsembung	97.63	97.63
10	Karangwareng	97.04	97.04
11	Lemahabang	96.98	96.98
12	Susukanlebak	97.98	97.98
13	Sedong	96.88	96.88
14	Astanajapura	93.78	93.78
15	Pangenan	92.56	92.56
16	Mundu	94.06	94.06
17	Beber	98.16	98.18
18	Grged	92.04	92.04
19	Talun	98.26	98.26
20	Sumber	97.50	97.50
21	Dukupuntang	98.54	98.54
22	Palimanan	95.56	95.56
23	Plumbon	97.52	97.52

24	Depok	96.78	96.78
25	Weru	99.04	99.04
26	Plered	97.90	97.90
27	Tengahtani	98.69	98.69
28	Kedawung	99.08	99.08
29	Gunungjati	90.86	90.86
30	Kapetakan	84.40	84.40
31	Suranenggala	89.56	89.56
32	Klangenan	93.79	93.79
33	Jamblang	93.21	93.21
34	Arjawinangun	96.60	96.60
35	Panguragan	90.44	90.44
36	Ciwaringin	93.47	93.47
37	Gempol	92.29	92.29
38	Susukan	88.48	88.48
39	Gegesik	87.10	87.10
40	Kaliwedi	90.03	90.03
KAB. CIREBON		94.07	94.07

II.4 Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang tertentu pada wilayah tertentu. Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau anak-anak yang tidak menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Angka Putus Sekolah digunakan sebagai salah satu indicator keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan.

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Cirebon berdasarkan data dari dinas pendidikan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.4

Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan SD,SLTP dan SLTA
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Waled	0.20	0.11	0.15	0.90	0.68	0.78	1.92	4.33	1.53
2	Ciledug	0.19	0.28	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Losari	0.03	0.00	0.01	0.30	0.22	0.26	0.98	2.88	0.71
4	Babakan	0.21	0.11	0.16	1.08	0.32	0.70	0.12	0.72	0.20
5	Karangsembung	0.10	0.00	0.05	1.16	0.74	0.94	0.00	0.00	0.00
6	Lemahabang	0.12	0.06	0.09	0.46	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
7	Sedong	0.18	0.09	0.13	1.31	0.63	0.99	0.00	0.00	0.00
8	Astanajapura	0.12	0.23	0.17	0.13	0.00	0.06	0.64	2.92	0.79
9	Mundu	0.28	0.36	0.32	2.64	2.43	2.53	0.00	0.00	0.00
10	Beber	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	8.91	1.38
11	Sumber	0.04	0.06	0.05	0.09	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00

12	Palimanan	0.03	0.00	0.01	0.78	0.36	0.56	0.54	0.57	0.39
13	Plumbon	0.19	0.03	0.11	0.05	0.05	0.05	0.54	0.00	0.00
14	Weru	0.00	0.03	0.01	0.27	0.12	0.19	0.00	0.33	0.24
15	Kapetakan	0.27	0.07	0.17	1.23	0.08	0.67	0.32	0.00	0.00
16	Klangenan	0.18	0.04	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Arjawinangun	0.03	0.00	0.01	0.29	0.09	0.19	0.00	0.00	0.00
18	Ciwaringin	0.00	0.00	0.00	0.48	0.42	0.45	0.00	0.17	0.07
19	Susukan	0.20	0.09	0.15	0.19	0.38	0.29	0.10	0.00	0.00
20	Gegesik	0.26	0.19	0.22	1.06	0.27	0.65	0.00	2.05	0.38
21	Susukanlebak	0.05	0.00	0.02	1.78	1.14	1.45	0.00	0.00	0.00
22	Pabedilan	0.07	0.14	0.10	1.10	49.00	0.79	0.00	0.00	0.00
23	Dukupuntang	0.00	0.00	0.00	0.70	0.12	0.41	0.00	0.00	0.00
24	Panguragan	0.32	0.13	0.23	2.33	1.98	2.15	0.00	4.26	2.61
25	Kaliwedi	0.24	0.21	0.23	2.72	0.93	1.79	3.69	0.00	0.00
26	Pangenan	0.04	0.17	0.10	0.08	0.00	0.04	0.00	25.29	4.67
27	Gebang	0.54	0.16	0.36	3.25	0.70	1.97	1.95	0.00	0.00
28	Depok	0.06	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.38
29	Kedawung	0.08	0.00	0.04	0.47	0.46	0.47	0.38	3.16	1.67
30	Karangwareng	0.14	0.08	0.11	0.54	0.53	0.54	0.22	0.00	0.00
31	Talun	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Gunungjati	0.03	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Pasaleman	0.36	0.08	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Pabuaran	0.21	0.29	0.25	5.16	1.93	3.64	0.00	0.00	0.00
35	Tengahtani	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Plered	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Gempol	0.21	0.05	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Greged	0.15	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Suranenggala	0.04	0.00	0.20	0.32	0.31	0.32	0.00	0.00	0.00
40	Jamblang	0.00	0.00	0.00	0.13	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00
Rata-rata		0.13	0.08	0.11	0.68	0.34	0.51	0.74	372.88	0.41

Berdasarkan data tersebut, bahwa angka putus sekolah tingkat Sekolah Dasar rata-rata sebesar 11% yang terdiri dari 13% laki-laki dan 8% perempuan. Untuk tingkat SLTP sebanyak 51% yang terdiri dari 34% laki-laki dan 74% perempuan sedangkan angka putus sekolah untuk SLTA sebanyak 41% yang terdiri dari 74% laki-laki dan 37% perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebanding antara laki-laki dan perempuan dari berbagai tingkatan sekolah banyak yang putus sekolah.

II.5. Sertifikasi Guru

Upaya Pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga pendidik yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional. Guru yang sudah mendapat Sertifikat Pendidik berarti Guru tersebut sudah di anggap profesional dalam menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Berikut ini adalah jumlah guru yang telah memperoleh sertifikasi :

Tabel : 2.5

Jumlah Guru Negeri yang telah memperoleh Sertifikasi jenjang pendidikan SD dan SLTP dan SLTA menurut jenis kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Guru SD			Guru SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Arjawinangun	56	90	146	47	44	91	19	6	25
2	Astanajapura	58	103	161	30	19	49	36	12	48
3	Babakan	90	50	140	61	34	95	21	11	32
4	Beber	89	109	198	43	51	94	37	15	52
5	Ciledug	50	70	120	10	13	23	3	1	4
6	Ciwaringin	58	102	160	39	37	76	83	56	139
7	Depok	53	61	114	8	8	16	2	0	2
8	Dukupuntang	63	64	127	17	19	36	31	19	50
9	Gebang	70	54	124	31	32	63	32	45	77
10	Gegesik	35	59	94	29	20	49	26	7	33
11	Gempol	111	193	304	66	104	170	37	22	59
12	Greged	87	119	206	56	65	121	44	26	70
13	Gunungjati	82	167	249	31	56	87	32	21	53
14	Jamblang	64	126	190	44	57	101	22	14	36
15	Kaliwedi	76	72	148	15	20	35	0	1	1
16	Kapetakan	67	134	201	18	16	34	17	6	23
17	Karangsembung	86	124	210	71	57	128	27	19	46
18	Karangwareng	60	71	131	27	20	47	22	7	29
19	Kedawung	102	65	167	22	10	32	41	19	60
20	Klangenan	118	119	237	87	46	133	36	16	52
21	Lemahabang	48	58	106	24	14	38	0	1	1
22	Losari	79	61	140	25	17	42	15	9	24
23	Mundu	87	99	186	43	25	68	37	20	57
24	Pabedilan	59	59	118	28	19	47	10	1	11
25	Pabuaran	50	61	111	27	9	36	2	0	2
26	Palimanan	43	38	81	29	11	40	2	0	2
27	Pangenan	53	93	146	59	42	101	12	6	18
28	Panguragan	100	109	209	40	41	81	6	12	18
29	Pasaleman	31	88	119	16	38	54	64	74	138
30	Plered	37	44	81	23	11	34	11	6	17
31	Plumbon	62	103	165	14	26	40	0	0	0
32	Sedong	98	117	215	34	62	96	15	5	20
33	Sumber	43	42	85	14	8	22	0	0	0
34	Suranenggala	40	67	107	36	22	58	6	1	7

35	Susukan	37	71	108	15	21	36	5	2	7
36	Susukanlebak	50	109	159	25	44	69	7	7	14
37	Talun	72	67	139	15	7	22	1	0	1
38	Tengahtani	57	36	93	22	11	33	1	0	1
39	Waled	58	79	137	20	21	41	15	8	23
40	Weru	63	82	145	21	26	47	47	29	76
JUMLAH		2.642	3.435	6.077	1.282	1.203	2.485	824	504	1.328

Dari tabel diatas dapat terlihat sudah banyaknya guru di tingkat SD, SLTP dan Pengawas yang mendapatkan sertifikasi. Sedangkan dari segi keseimbangan antara guru laki-laki dan guru perempuan sudah terlihat seimbang. Ini berarti sudah terjadi kesetaraan gender di lingkungan guru.

II.6 Angka Kelulusan Paket A, B, dan C

Berikut ini adalah angka kelulusan siswa dan siswi yang mengikuti program paket A, B dan C :

Tabel : 2.6
Angka Kelulusan Paket A, B, dan C menurut jenis kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Arjawinangun			0	53	22	75	67	33	100
2	Astanajapura	44	9	53			0			0
3	Babakan	14	1	15	21	9	30	36	18	54
4	Beber			0			0			0
5	Ciledug	11	1	12	19	6	25	36	18	54
6	Depok			0	16	6	22	14	7	21
7	Talun			0	19	15	34	57	16	73
8	Klangenan			0			0	14	8	22
9	Ciwaringin			0			0	10	13	23
10	Gegesik			0	17	6	23			0
11	Kapetakan			0	20	4	24	33	17	50
12	Karangsembung			0	8	3	11	28	12	40
13	Jamblang			0	11	3	14	15	3	18
14	Lemahabang			0	20	2	22	19	7	26
15	Losari			0			0			0
16	Palimanan			0	7	2	9	3	1	4
17	Plumbon	4		4	15	3	18	15	5	20
18	Sumber			0			0	18	10	28
19	Susukan			0			0			0
20	Waled			0			0			0
21	Weru	18	4	22	26	20	46	87	41	128
22	Mundu	19	4	23	22	11	33	27	15	42
23	Sedong			0	19	9	28			0
24	Dukupuntang			0	28	12	40	39	18	57
25	Kaliwedi			0			0	5	6	11
26	Pabedilan			0			0	3	2	5

27	Pangenan			0		0	10	5	15
28	Panguragan			0	17	15	32	26	39
29	Kedawung			0		0	10	6	16
30	Susukanlebak			0	14	7	21		0
31	Gebang			0	31	13	44	44	18
32	Gempol			0		0			0
33	Karangwareng			0	16	6	22	17	25
34	Pabuaran			0	18	4	22	24	13
35	Pasaleman			0		0			0
36	Plered			0	13	7	20	21	28
37	Tengahtani			0	18	5	23	26	35
38	Greged			0	19	12	31	21	40
39	Suranenggala	7	3	10	19	11	30	64	25
40	Gunungjati	18	3	21	14	4	18	45	21
JUMLAH		135	25	160	500	217	717	834	394
									122 8

II.7 Penerima Bea Siswa Tingkat SMA/SMK

Untuk penerima Bea Siswa Tingkat SMA/SMK dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel : 2.7

Jumlah penerima Bea Siswa Tingkat SMA/SMK menurut jenis kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	KECAMATAN	SLTA		
		L	P	L+P
1	Arjawinangun	144	236	380
2	Astanajapura	105	192	297
3	Babakan	124	229	353
4	Beber	72	87	159
5	Ciledug	77	222	299
6	Ciwaringin	290	372	662
7	Dukupuntang	130	238	368
8	Gegesik	330	512	842
9	Jamblang	242	265	507
10	Karangwareng	29	114	143
11	Lemahabang	146	507	653
12	Losari	294	351	645
13	Pabeledan	98	140	238
14	Sumber	280	160	440
15	Suranenggala	329	335	664
16	Susukan	511	582	1093
17	Waled	178	369	547
18	Weru	322	358	680
19	Kedawung	266	491	757
20	Cirebon	22	27	49
21	Karangsembung	83	89	172

22	Klangenan	33	8	41
23	Palimanan	63	42	105
24	Panguragan	97	100	197
25	Tengahtani	11	14	25
26	Plumbon	348	673	1021
27	Gebang	125	32	157
28	Gunungjati	75	45	120
29	Mundu	41	15	56
30	Pabuaran	97	19	116
31	Sedong	6	12	18
32	Depok	210	457	667
33	Greged	61	52	113
JUMLAH		5.239	7.345	12.584

II.8 Pekerja Profesional Bidang Pendidikan

Di bidang pendidikan terdapat pekerja profesional yang terdiri dari Guru, Dosen, Peneliti, Kepala Sekolah, Dekan dan Rektor. Berdasarkan data bahwa Profesi Guru yang paling banyak yaitu 706 orang yang terdiri dari 358 laki-laki dan 348 perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.8

**Pekerja Profesional Bidang Pendidikan menurut jenis kelamin
di kabupaten Cirebon pada Tahun 2023**

BIDANG PENDIDIKAN				
No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Guru	358	348	706
2	Dosen	6	2	8
3	Peneliti	-	-	-
4	K.Sekolah	48	34	82
5	Dekan	-	-	-
6	Rektor	-	-	-
Sub Jumlah		412	384	796

2.2. KESEHATAN

Pembangunan kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dinilai keberhasilannya melalui tolak ukur beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita. Capaian dari hasil pembangunan di Kabupaten Cirebon tahun 2014 khususnya di bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Tahun 2005 AHH mencapai 64,78 dan tahun 2011 meningkat menjadi 65,59. Angka tersebut masih di bawah angka provinsi Jawa Barat yaitu tahun 2005 sebesar 66,47 dan tahun 2011 menjadi 68,40.

Beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kesetaraan gender di bidang kesehatan, diantaranya adalah angka harapan hidup, status kesehatan yang diukur melalui angka kesakitan, yaitu penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktifitas sehari-harinya disertai dengan jenis-jenis keluhan, lalu akses ke pelayanan kesehatan meliputi cara berobat, jenis-jenis obat yang digunakan dan fasilitas kesehatan tempat penduduk berobat, kemudian ukuran fertilitas yang menyangkut umur perkawinan pertama dan rata-rata anak lahir hidup, Keluarga Berencana (KB) yang meliputi status pemakaian alat KB dan jenis-jenis alat KB yang digunakan serta pengetahuan dan jumlah HIV/ AIDS.

II.1 Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup atau Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan khususnya. Umur Harapan Hidup ini dipengaruhi oleh angka kematian dan angka kesakitan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2015 adalah 70.47. Peningkatan angka harapan hidup dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Tabel : 2.1
Angka Harapan Hidup
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	
		Angka	Indeks
1	2	3	4
1	WALED	70.83	76.38
2	PASALEMAN	72.05	78.41
3	CILEDUG	70.97	76.62
4	PABUARAN	71.39	77.32
5	LOSARI	70.21	75.35
6	PABEDILAN	69.79	74.66
7	BABAKAN	70.77	76.28
8	GEBANG	71.31	77.18
9	KARANGSEMBUNG	69.78	74.63
10	KARANGWARENG	69.21	73.68
11	LEMAHABANG	69.70	74.50
12	SUSUKANLEBAK	70.88	76.46

13	SEDONG	69.47	74.12
14	ASTANAJAPURA	69.89	74.81
15	PANGENAN	69.48	74.14
16	MUNDU	70.37	75.62
17	BEBER	68.49	72.48
18	GREGED	72.56	79.26
19	TALUN	69.65	74.41
20	SUMBER	69.70	74.51
21	DUKUPUNTANG	70.17	75.28
22	PALIMANAN	70.66	76.11
23	PLUMBON	71.10	76.83
24	DEPOK	70.29	75.90
25	WERU	70.54	76.89
26	PLERED	71.14	75.67
27	TENGAHTANI	70.40	76.03
28	KEDAWUNG	70.62	76.44
29	GUNUNGJATI	70.86	77.97
30	KAPETAKAN	71.78	78.95
31	SURANENGGALA	72.37	77.37
32	KLANGENAN	71.42	78.34
33	JAMBLANG	72.01	74.31
34	ARJAWINANGUN	69.59	76.04
35	PANGURAGAN	70.62	76.06
36	CIWARINGIN	70.63	75.30
37	GEMPOL	70.18	75.30
38	SUSUKAN	70.40	75.67
39	GEGESIK	68.80	73.00
40	KALIWEDI	69.52	74.20
KAB. CIREBON		70.47	75.79

Berdasarkan grafik di atas, bahwa Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon 70.47 dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Barat 72,41. Sedangkan Angka Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan. Pemerintah beserta masyarakat harus bekerja keras untuk dapat meningkatkan AHH.

II.2 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) atau Material Mortality Rate (MMR) Mengambarkan angka kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa infas pada tiap 100.000 kelahiran hidup dalam wilayah dan waktu tertentu. Angka ini memberikan gambaran status gizi dan kesehatan ibu, kondisi sosial ekonomi, kesehatan lingkungan dan tingkat pelayanan kesehatan, terutama pelayanan kesehatan maternal (kesehatan ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas)

Jumlah Kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas di Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.2
Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Kematian Ibu			
			Hamil	Melahirkan	Nifas	Jumlah
1	Waled	Waled	0	0	0	1
		Cibogo	0	0	0	2
2	Pasaleman	Pasaleman	0	0	1	0
3	Ciledug	Ciledug	1	1	1	0
4	Pabuaran	Pabuaran	2	1	1	0
5	Losari	Losari	0	0	3	2
		Astanalanggar	1	1	1	0
6	Pabedilan	Tersana	0	1	1	1
		Kalibuntu	0	0	0	0
7	Babakan	Babakan	0	0	0	2
		Gembongan	0	1	0	0
8	Gebang	Gebang	1	0	0	1
9	Karangsembung	Karangsembung	0	0	0	1
10	Karangwareng	Kubangdeleg	1	1	0	0
11	Lemahabang	Sindanglaut	0	0	0	0
12	Susukan Lebak	Susukan Lebak	1	0	0	1
13	Sedong	Sedong	0	0	0	0
14	Astanajapura	Astanajapura	0	1	0	0
		Sidamulya	2	0	0	0
15	Pangenan	Pangenan	1	0	1	1
16	Mundu	Mundu	1	0	0	1
17	Beber	Beber	0	0	0	2
18	Grged	Kamarang	0	0	0	0
19	Talun	Talun	0	0	1	1
		Ciperna	0	0	0	0
20	Sumber	Sumber	0	0	0	0
		Watubelah	0	0	0	1
		Sendang	0	0	0	0
21	Dukupuntang	Dukupuntang	0	0	0	0
		Sindangjawa	0	0	0	0
22	Palimanan	Palimanan	1	0	0	1
		Kepuh	1	0	0	2
23	Plumbon	Plumbon	1	0	0	1
		Lurah	0	0	0	1
24	Depok	Waruoyom	0	0	1	1
25	Weru	Karangsari	0	0	0	1
26	Plered	Plered	0	1	1	1

		Pangkalan	0	0	0	1
27	Tengahtani	Astapada	0	0	0	0
28	Kedawung	Kedawung	1	0	0	1
29	Gunungjati	Gunungjati	0	1	0	1
		Mayung	0	0	0	1
30	Kapetakan	Kedaton	0	1	1	6
31	Suranenggala	Suranenggala	0	1	0	1
32	Klangenan	Klangenan	0	0	0	0
		Jemaras	0	0	0	0
33	jamblang	Wangunharja	2	3	1	0
34	Arjawinangun	Tegalgubug	1	0	3	3
35	Panguragan	Panguragan	0	0	0	1
36	Ciwaringin	Ciwaringin	0	0	0	1
37	Gempol	Gempol	0	0	0	1
		Winong	1	0	0	1
38	Susukan	Susukan	0	0	0	2
		Bunder	0	0	0	2
39	Gegesik	Gegesik	1	0	0	1
		Jagapura	0	0	1	0
40	Kaliwedi	Kaliwedi	1	0	0	1
JUMLAH			21	14	18	49
ANGKA KEMATIAN IBU (DILAPORKAN)						102

Angka kematian ibu di Kabupaten Cirebon adalah 49 per 100.000 kelahiran hidup dari hasil survei tersebut di ketahui jumlah kematian ibu terbesar terjadi pada saat hamil.

Berdasarkan penyebabnya, kematian ibu/materna dari tahun ke tahun selalu didominasi oleh pendarahan, eklamsi, infeksi, Abortus dan Persalinan lama. Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dilakukan secara komprehensif melalui berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi yang diimplementasikan oleh Pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta LSM/N

GO Program jampersal (jaminan persalinan), BOK (Bantuan Operasional Kesehatan), Program PONED dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar dan Komprehensif) dan Program EMAS (Expanding Maternal and Neonatal Survival). Semua Program-Program tersebut merupakan upaya dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

Di kabupaten Cirebon penyebab kematian ibu melahirkan adalah eklamsia, infeksi pendarahan dan lain-lain hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.3
Penyebab Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan dan Nifas
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	KECAMATAN	Penyebab kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas					
		Perdar ahan	Eklam sia	Infeks i	Abortu s	Persal inan Lama/ Macet	Lain-lain
1	Waled					1	
2	Cibogo						2
3	Pasaleman						
4	Ciledug						
5	Pabuaran						
6	Losari	1	1				
7	Astanalanggar						
8	Tersana	1					
9	Kalibuntu						
10	Babakan		2				
11	Gembongan						
12	Gebang			1			
13	Karangsempu ng						
14	Kubangdeleg		1				
15	Sindanglaut						
16	Susukan Lebak	1					
17	Sedong						
18	Astanajapura						
19	Sidamulya						
20	Pangenan	1					
21	Mundu	1					
22	Beber		1				1
23	Kamarang						
24	Talun		1				
25	Ciperna						
26	Sumber						
27	Watubelah						1
28	Sendang						
29	Dukupuntang						
30	Sindangjawa						
31	Palimanan						1
32	Kepuh	1	1				
33	Plumbon	1					
34	Lurah						1
35	Waruroyom		1				
36	Karangsari						1
37	Plered	1					

38	Pangkalan	1						
39	Astapada							
40	Kedawung		1					
41	Gunungjati	1						
42	Mayung						1	
43	Kedaton		2	1				3
44	Suranenggala							1
45	Klangenan							
46	Jemaras							
47	Wangunharja							
48	Tegalgubug	1	1	1				
49	Panguragan	1						
50	Ciwaringin		1					
51	Gempol	1						
52	Winong	1						
53	Susukan	2						
54	Bunder						2	
55	Gegesik							1
56	Jagapura							
57	Kaliwedi							1
JUMLAH		16	13	3	0	1	16	

Dari table diatas dapat dilihat bahwa penyebab kematian ibu akibat melahirkan terbanyak adalah karena pendarahan sebanyak 16 kematian.

II.3 Penderita HIV/ AIDS.

Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan penyakit pandemic yang penyebarannya sangat cepat. Di Kabupaten Cirebon , kasus HIV/AIDS tahun 2023 secara komulatif sudah mencapai 170 kasus yang mana kasus tertinggi ada pada kelompok Perempuan sebanyak 96 kasus (56,47%) sedangkan laki-laki sebanyak 74 kasus (45,53%).

Tabel : 2.4

Penderita HIV/AIDS dan SYPHILIS menurut Jenis Kelamin di kabupaten Cirebon pada Tahun 2023

N o	Kelomp ok Umur	HIV			AIDS			SYPHILIS			Jumlah Kematian Akibat AIDS		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	1-4 Th	1	2	3	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	5-14 Th	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	15-19 Th	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
4	20-24 Th	5	8	13	15	14	29	15	14	29	0	0	0
5	25-49 Th	82	61	143	98	67	165	98	67	165	0	0	0
6	> 50 Th	8	3	11	48	10	58	48	10	58	0	0	0
Jumlah		96	74	170	169	95	264	169	95	264	0	0	0
Proporsi Jenis kelamin		56.47	43.53		64.02	35.98		64,71	35,29		0	0	

Perjalanan kasus HIV mulai ditemukan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2000 sebanyak 3 kasus, tahun 2002 bertambah menjadi 68 kasus, kemudian pada tahun 2010 bertambah menjadi 501 kasus. Dalam kurun waktu 10 tahun rata-rata penemuan 50 kasus pertahun, sedangkan sampai 2015 secara komulatif sudah berkurang menjadi 170 kasus.

Berdasarkan penelitian WHO bahwa seseorang yang terkena HIV akan menjadi AIDS setelah 10 tahun dan diperkirakan hanya akan bertahan kurang lebih 5 tahun, maka kasus HIV di Cirebon ditemukan pertama kali tahun 2000 dikurangi 15 tahun, maka sejak tahun 1987 kasus HIV sudah ada.

II.4 Keluarga Berencana.

Keluarga Berencana merupakan program pemerintah untuk mengatur kelahiran baik jarak kelairan maupun jumlah anak yang dilahirkan dengan tujuan agar tercipta keluarga yang sejahtera.

Informasi mengenai tingkat pemakaian Kontrasepsi penting untuk mengukur keberhasilan KB, akan tercipta suatu kondisi ideal antara laju pertumbuhan penduduk dengan perkembangan sumber daya manusia, yang pada gilirannya akan tersedia SDM yang dapat terencana, terukur dan terarah.

Banyak cara untuk mengatur kelahiran dengan memakai alat kontrasepsi, alat kontrasepsi yang dapat dipergunakan oleh wanita, yaitu MOW (Metode Operasi Wanita), Implant, Suntik, Pil dan IUD, sedangkan alat kontrasepsi yang dapat dipakai oleh pria yaitu kondom dan MOP (Metode Operasi Pria).

Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, bahwa pengguna KB Wanita dan Pria dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.5

Akseptor Keluarga Berencana menurut jenis Kontrasepsi yang digunakan di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PIL	SUNTIK	IUD	IMPLANT	MOW	KONDOM	MOP
1	WALED	1,254	4,461	605	145	287	302	16
2	PASALEMAN	433	455	169	89	8	179	-
3	CILEDUG	1,014	4,110	565	61	280	99	14
4	PABUARAN	583	3,308	273	253	166	40	12
5	LOSARI	1,557	3,804	738	874	307	347	169
6	PABEDILAN	843	8,443	428	532	196	68	55
7	BABAKAN	1,887	6,432	721	257	347	77	22
8	GEBANG	1,085	7,214	661	642	339	21	42
9	KARANG SEMBUNG	629	3,456	431	460	314	109	35
10	KARANGWARENG	94	2,785	359	274	182	110	38
11	LEMAHABANG	860	4,030	969	273	450	146	63
12	SUSUKAN LEBAK	513	3,630	590	340	322	77	32
13	BEBER	302	243	25	50	16	6	10
14	SEDONG	214	1,093	95	133	12	25	-
15	ASTANAJAPURA	2,922	6,312	1,364	1,249	456	634	114
16	TALUN	1,472	6,549	616	743	472	193	34
17	SUMBER	2,292	6,836	1,246	824	685	118	61
18	DUKUPUNTANG	1,398	4,718	1,016	1,121	795	280	45

19	PALIMANAN	1,215	5,184	908	582	608	364	42
20	PLUMBON	892	7,513	534	598	611	16	42
21	WERU	1,760	4,656	482	487	294	96	36
22	PLERED	1,039	4,566	544	426	295	362	33
23	KEDAWUNG	3,184	3,977	899	260	291	233	25
24	TENGAHTANI	533	569	471	73	268	112	13
25	GUNUNGJATI	2,230	6,715	1,676	650	718	323	71
26	KAPETAKAN	1,773	5,028	400	571	238	172	53
27	KLANGENAN	364	956	61	1,175	329	15	5
28	ARJAWINANGUN	2,732	3,809	618	870	351	310	66
29	PANGURAGAN	2,902	3,968	442	604	255	296	26
30	CIWARINGIN	1,673	2,142	562	446	215	73	26
31	GEMPOL	1,861	3,170	509	847	217	54	51
32	SUSUKAN	3,052	4,324	534	865	608	243	33
33	GEGESIK	3,106	8,028	360	1,145	208	168	35
34	KALIWEDI	1,672	3,450	307	450	142	301	28
35	DEPOK	2,772	5,549	263	495	265	280	38
36	MUNDU	2,867	5,601	944	631	397	341	48
37	PANGENAN	1,198	4,110	458	988	260	18	58
38	GREGED	1,456	4,862	449	820	351	80	60
39	SURANENGGALA	1,245	3,630	474	287	378	93	10
40	JAMBLANG	1,409	2,514	482	1,032	351	114	124
J U M L A H		60,287	172,200	23,248	22,622	13,284	6,895	1,685

Tabel tersebut menunjukan, bahwa peserta KB bukan hanya perempuan tetapi juga Laki-laki yang pada saat ini menggunakan dua alat kontrasepsi, yaitu kondom dan MOP (Metoda Operasi Pria). Hal ini sudah menunjukan peran antara perempuan dan laki-laki sudah ada dan semakin meningkat.

Penyalahgunaan Narkoba.

Penyalahgunaan Narkoba pada saat ini semakin meningkat, sehingga membuat kita prihatin, karena korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya orang dewasa akan tetapi anak-anakpun menjadi korban yang disebabkan oleh ketidaktahuan, jadi korban penipuan atau bujuk rayu dan ingin coba-coba. Pada usia remaja mereka masih mencari jati diri dan gampah goyah , masih belum mempunyai pendirian sehingga mudah tergelincir, salah satunya mereka menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah melalui BNN atau Badan Narkotika Nasional melakukan berbagai program kegiatan untuk mencegah dan mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin marak.

Berdasarkan hasil survei dari BNN tahun 2011, bahwa 45 % penyalahgunaan narkoba berstatus teratur pakai, coba-coba dan pecandu suntik relative sama besarnya yaitu 27% dan pecandu suntik 2%. Dalam penelitian tersebut juga kecenderungan penyalahgunaan narkoba laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Berikut adalah Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (NAPZA) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) menurut Jenis Kelamin di

Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Pengguna NAPZA		
		L	P	L+P
1	WALED			0
2	PASALEMAN			0
3	CILEDUG	3		3
4	PABUARAN	2	1	3
5	LOSARI	4		4
6	PABEDILAN			0
7	BABAKAN	2		2
8	GEBANG	1		1
9	KARANG SEMBUNG	1		1
10	KARANGWARENG			0
11	LEMAHABANG			0
12	SUSUKAN LEBAK			0
13	BEBER			0
14	SEDONG			0
15	ASTANAJAPURA			0
16	TALUN	3		3
17	SUMBER	2		2
18	DUKUPUNTANG			0
19	PALIMANAN			0
20	PLUMBON	4		4
21	WERU	1		1
22	PLERED	2		2
23	KEDAWUNG	5		5
24	TENGAHTANI	1		1
25	GUNUNGJATI	3		3
26	KAPETAKAN			0
27	KLANGENAN	4		4
28	ARJAWINANGUN	1		1
29	PANGURAGAN			0
30	CIWARINGIN	1		1
31	GEMPOL			0
32	SUSUKAN	1		1
33	GEGESIK	2	1	3
34	KALIWEDI			0

35	DEPOK			0
36	MUNDU	1	1	2
37	PANGENAN	1		1
38	GREGED			0
39	SURANENGGALA	3		3
40	JAMBLANG	1		1
JUMLAH		49	3	52

Hasil table diatas Badan Narkotika Kabupaten Cirebon, bahwa jumlah penyalahgunaan narkotika laki-laki sebanyak 49 orang dan perempuan 3 orang

II.6 Pekerja Profesional Bidang Kesehatan

Di bidang kesehatan terdapat pekerja profesional yang terdiri profesi Dokter, Bidan, Perawat, Dokter Gigi, Tabib, Perawat, Apoteker dan Psikiater. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 2.7

**Pekerja Profesional Bidang Kesehatan menurut jenis kelamin
di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023**

DI BIDANG KESEHATAN					
No	Pekerjaan	Jenis kelamin		Jumlah	
		L	P		
1	Dokter	13	12	25	
2	Bidan	-	103	103	
3	Perawat	54	68	122	
4	D. Gigi	5	4	9	
5	Tabib	2	-	2	
6	Apoteker	1	-	1	
7	Psikiater	-	1	1	
Sub Jumlah		75	188	263	

III.1 EKONOMI

Perkembangan informasi global berpengaruh pada pembuka wawaasan dan pengetahuan masyarakat untuk dapat memperbaiki taraf kehidupan dan memperoleh pendapatan lebih dengan cara yang mudah dan cepat. Salah satunya dengan bekerja di luar negeri menjadi tenaga migrant. Pada kenyataannya penempatan TKI di luar masih banyak menemui masalah diantaranya, menyangkut perlindungan dan penempatan TKI.

Tenaga kerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia menurut jenis pekerjaannya dan jenis kelamin dikabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 3.1

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kabupaten

Cirebon Tahun 2023

No	Pekerjaan	Jumlah	
		Laki-laki	Perempuan
1	House Maid	1	2,469
2	Care Taker	4	1,307
3	Caregiver	2	1,002
4	Construction Worker	80	-
5	Fisherman	13	-
6	Operator	64	214
7	Domestic Worker	-	262
8	Domestic Helper	-	248
9	Cleaning Service	1	44
10	Farmer	1	1
11	Worker	110	36
12	Nurse	-	3
13	Nursing Home	-	4
14	Ordinary Labourer	1	-
15	General Cleaning Labor	1	-
16	Production Operator	10	312
17	Industriant Worker	25	1
18	Housekeepers	-	35
19	Restaurant Worker	9	-
20	Service Crew	4	15
21	Patient Attendant	-	-
22	Factory Worker	2	-
23	Cleaners	2	186
24	Waiter	-	11
25	Factory Worker	1	-
JUMLAH		331	6,150

Berdasarkan pada tabel tersebut bahwa tenaga kerja Indonesia paling besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 6,150 orang dibandingkan laki-laki sebanyak 331 orang.

Tenaga kerja migrant atau TKI bekerja diberbagai sektor ada yang menjadi pekerja pabrik, pembantu rumah tangga, operator dsb. Sebagian menjadi Pembantu Rumah tangga. Hal ini menunjukan pendidikan dan keterampilan TKI relative rendah.

Adapun Negara yang menjadi tujuan TKI untuk bekerja di luar negeri dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia menurut Negara Tujuan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Negara Tujuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Bahrain	-	63
2	Oman	-	275
3	Qatar	-	1
4	U. Arab Emirates	1	201
5	Arab Saudi	15	13
6	Brunai Darussalam	-	6
7	Hongkong	-	430
8	Malaysia	110	1,071
9	Singapura	1	1,733
10	Taiwan	204	2,357
JUMLAH		331	6,150

Berdasarkan tabel tersebut yang menjadi tujuan Tenaga Kerja Indonesia bekerja di luar negeri sebagian besar ke Negara Taiwan dan Oman.

Pendidikan sangat menentukan jenis pekerjaan tenaga kerja Indonesia. Peningkatan Pendidikan perlu diusahakan pada para TKI agar pekerjaan yang diberikan lebih berkualitas sehingga mempengaruhi pendapatan yang diterima akan jauh lebih besar.

Tingkat pendidikan Tenaga kerja Indonesia seudah semakin meningkat ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel : 3.3

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia menurut Jenis Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	TTSD	-	-	-
2	SD	48	545	593
3	SLTP	85	1,134	1,219
4	SLTA	85	648	733
5	D I	-	6	6
6	D II	113	3,817	3,930
7	D III	-	-	-
8	S I	-	-	-
9	S II	-	-	-
J U M L A H		331	6,150	6,481

Dapat dilihat pada tabel diatas yang berpendidikan Tamat Sekolah Dasar sebanyak 593 orang, Sekolah Menengah sebanyak 1,219 orang, SLTA sebanyak 733 orang, Diploma I sebanyak 6 orang dan diploma II 3,930 orang.

IV.2 Usaha Mikro dan Kecil (UKM).

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan untuk kepentingan kesejahteraan pengurus dan anggotanya serta mewujudkan tatanan ekonomi rakyat. Jenis koperasi yang ada yaitu usaha mikro dan Usaha Kecil Usaha mikro merupakan peluang usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan. Usaha kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tak langsung dari usaha menengah atau usaha.

Di kabupaten Cirebon Usaha Mikro dan Kecil menurut Jenis Kelamin dan jenis usahanya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel : 4.1
Usaha Mikro (UKM) menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Usaha Mikro		L+P
		L	P	
1	Arjawinangun	149	99	248
2	Astanajapura	95	63	158
3	Babakan	86	57	143
4	Beber	256	170	426
5	Ciledug	832	554	1,386
6	Ciwaringin	638	426	1,064
7	Depok	160	106	266
8	Dukupuntang	499	332	831
9	Gebang	208	139	347
10	Gegesik	415	277	692
11	Gempol	523	349	872
12	Greded	590	393	983
13	Gunungjati	539	360	899
14	Jamblang	419	279	698
15	Kaliwedi	29	19	48
16	Kapetakan	58	38	96
17	Karangwareng	202	134	336
18	Karangsembung	23	15	38
19	Kedawung	563	376	939
20	Klangenan	629	419	1,048
21	Lemahabang	171	114	285
22	Losari	144	96	240
23	Mundu	1,093	728	1,821
24	Pabedilan	431	287	718

25	Pabuaran	44	30	74
26	Palimanan	151	101	252
27	Pangenan	454	302	756
28	Panguragan	191	128	319
29	Pasaleman	291	194	485
30	Plered	83	56	139
31	Plumbon	100	67	167
32	Sedong	38	25	63
33	Sumber	309	206	515
34	Suranenggala	676	450	1,126
35	Susukan	323	215	538
36	Susukanlebak	147	98	245
37	Talun	104	70	174
38	Tengahtani	73	49	122
39	Waled	284	190	474
40	Weru	190	127	317
JUMLAH		12,210	8,138	20,348

Tabel : 4.2
Usaha Kecil (UKM) menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Usaha Kecil		L+P
		L	P	
1	Arjawinangun	224	149	373
2	Astanajapura	8	6	14
3	Babakan	10	7	17
4	Beber	40	27	67
5	Ciledug	418	279	697
6	Ciwaringin	36	24	60
7	Depok	9	6	15
8	Dukupuntang	37	24	61
9	Gebang	27	18	45
10	Gegesik	50	34	84
11	Gempol	118	78	196
12	Greged	123	82	205
13	Gunungjati	98	65	163
14	Jamblang	34	22	56
15	Kaliwedi	5	3	8
16	Kapetakan	2	1	3
17	Karangwareng	-	-	-
18	Karangsembung	56	37	93
19	Kedawung	281	187	468
20	Klangenan	45	30	75
21	Lemahabang	32	22	54
22	Losari	10	7	17
23	Mundu	20	13	33
24	Pabedian	11	7	18
25	Pabuaran	-	-	-
26	Palimanan	29	20	49
27	Pangenan	10	6	16
28	Panguragan	28	19	47
29	Pasaleman	-	-	-
30	Plered	14	9	23
31	Plumbon	46	31	77
32	Sedong	86	57	143
33	Sumber	149	100	249
34	Suranenggala	44	29	73
35	Susukan	-	-	-
36	Susukanlebak	28	19	47
37	Talun	20	14	34
38	Tengahtani	68	45	113
39	Waled	202	134	336
40	Weru	445	296	741

JUMLAH	2,863	1,907	4,770
--------	-------	-------	-------

V.3 Keanggotaan Koperasi.

Menjadi anggota koperasi yang maju sangat dirasakan manfaatnya bagi anggota yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, sehingga banyak yang menjadi anggota koperasi dari tahun ke tahun. Keanggotaan koperasi di kabupaten Cirebon dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Keanggotaan Koperasi menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023**

No	Kecamatan	Keanggotaan Koperasi		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Arjawinangun	5,904	2,644	8,548
2	Astanajapura	6,738	2,886	9,624
3	Babakan	3,721	1,608	5,329
4	Beber	2,294	980	3,274
5	Ciledug	4,205	1,851	6,056
6	Ciwaringin	5,229	2,260	7,489
7	Depok	1,321	567	1,888
8	Dukupuntang	2,837	1,216	4,053
9	Gebang	2,641	1,132	3,773
10	Gegesik	5,836	2,501	8,337
11	Gempol	1,147	491	1,638
12	Greded	3,234	1,386	4,620
13	Gunungjati	164	70	234
14	Jamblang	216	93	309
15	Kaliwedi	962	411	1,373
16	Kapetakan	4,068	1,744	5,812
17	Karangwareng	444	186	630
18	Karangsembung	2,607	1,117	3,724
19	Kedawung	1,092	468	1,560
20	Klangenan	1,054	446	1,500
21	Lemahabang	4,816	2,064	6,880
22	Losari	1,185	508	1,693
23	Mundu	3,886	1,665	5,551
24	Pabeledilan	674	290	964
25	Pabuaran	328	142	470
26	Palimanan	5,104	2,192	7,296
27	Pangenan	2,407	1,032	3,439
28	Panguragan	2,925	1,253	4,178
29	Pasaleman	382	164	546
30	Plered	2,331	1,000	3,331
31	Plumbon	6,326	2,711	9,037
32	Sedong	4,842	2,125	6,967

33	Sumber	13,097	5,516	18,613
34	Suranenggala	1,392	592	1,984
35	Susukan	1,752	751	2,503
36	Susukanlebak	3,206	1,374	4,580
37	Talun	1,039	446	1,485
38	Tengahtani	3,752	1,608	5,360
39	Waled	1,049	450	1,499
40	Weru	1,474	632	2,106
JUMLAH		117,681	50,572	168,253

Adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan yang ikut serta dalam keanggotaan.

VI.4 Penerima Kredit/ Pinjaman dari Lembaga Keuangan.

Koperasi yang maju sangat dirasakan manfaatnya bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya, banyak yang menjadi anggota koperasi dari tahun ke tahun. Berikut adalah Koperasi penerima bantuan Pinjaman dari Lembaga Keuangan dapat dilihat dari tabel ini :

Tabel : 6.1
Penerima Kredit/ Pinjaman dari Lembaga Keuangan
menurut jenis kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Penerima Kredit/ Pinjaman		L+P
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)	
1	Arjawinangun	7	2	9
2	Astanajapura	1	2	3
3	Babakan	-	-	-
4	Beber	-	-	-
5	Ciledug	1	-	1
6	Ciwaringin	1	-	1
7	Depok	1	-	1
8	Dukupuntang	3	-	3
9	Gebang	-	-	-
10	Gejesik	1	1	2
11	Gempol	-	-	-
12	Greged	-	2	2
13	Gunungjati	-	-	-
14	Jamblang	1	1	2
15	Kaliwedi	1	-	1
16	Kapetakan	-	-	-
17	Karangwareng	-	-	-
18	Karangsembung	1	1	2
19	Kedawung	-	-	-

20	Klangenan	1	-	1
21	Lemahabang	-	-	-
22	Losari	1	-	1
23	Mundu	1	-	1
24	Pabeledilan	1	-	1
25	Pabuaran	-	-	-
26	Palimanan	2	-	2
27	Pangenan	-	-	-
28	Panguragan	-	-	-
29	Pasaleman	-	-	-
30	Plered	-	-	-
31	Plumbon	1	-	1
32	Sedong	-	-	-
33	Sumber	2	1	3
34	Suranenggala	-	-	-
35	Susukan	7	-	7
36	Susukanlebak	-	-	-
37	Talun	2	1	3
38	Tengahtani	1	1	2
39	Waled	-	-	-
40	Weru	2	-	2
JUMLAH		39	12	51

VII.5 Pekerja Profesional Bidang Ekonomi.

Dibidang Ekonomi terdapat pekerja profesional yang terdiri dari Akuntan, Konsultan, Arsitek, Manager dan Insinyur. Untuk kelompok profesi di bidang ekonomi yang jumlahnya lebih besar yaitu profesi Akuntan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 laki-laki. Seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 7.1

**Pekerja Profesional Bidang Naker dan Ekonomi menurut jenis kelamin
di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2016**

No	Pekerjaan	Jenis kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Akuntan	8	-	8
2	Konsultan	1	-	1
3	Arsitek	5	-	5
4	Manager	2	-	2
5	Insinyur	1	-	1
Sub Jumlah		17	-	17

2.4 SOSIAL

Dalam kehidupan sehari-hari, individu selalu melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok-kelompok tertentu. Hubungan sosial yang terjadi antar individu maupun antar kelompok tersebut juga dikenal dengan istilah interaksi sosial. Interaksi antara berbagai segi kehidupan yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu akan membentuk suatu pola hubungan yang saling mempengaruhi sehingga akan membentuk suatu sistem sosial dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan proses sosial. Proses sosial yang terjadi dalam masyarakat tentunya tidak selalu berjalan dengan tertib dan lancar, karena masyarakat pendukungnya memiliki berbagai macam karakteristik.

Demikian pula halnya dengan interaksi sosial atau hubungan sosial yang merupakan wujud dari proses-proses sosial yang ada. Keragaman hubungan sosial itu tampak nyata dalam struktur sosial masyarakat yang majemuk, contohnya seperti Indonesia. Keragaman hubungan sosial dalam suatu masyarakat bisa terjadi karena masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaan yang berbeda-beda, bahkan dalam satu suku bangsa pun memiliki perbedaan. Namun, perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah suatu gejala sosial yang wajar dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan hal itulah maka didapatkan suatu pengertian tentang keragaman hubungan sosial, yang merupakan suatu pergaulan hidup manusia dari berbagai tipe kelompok yang terbentuk melalui interaksi sosial yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Keragaman hubungan sosial dapat menimbulkan ketidakharmonisan, pertentangan, pertikaian antarsuku bangsa maupun intern suku bangsa. Jika keselarasan tidak ditanamkan sejak dulu, terutama dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia yang memiliki keragaman hubungan sosial, maka dampak negatif tersebut akan menjadi kenyataan. Sebaliknya jika keselarasan dipupuk terutama dalam masyarakat majemuk, maka dampak negatif tersebut tidak akan terjadi, bahkan keragaman kebudayaan dalam masyarakat majemuk akan menjadi suatu aset budaya yang tak ternilai harganya.

Dari berbagai kehidupan sosial yang ada, berikut ini adalah jumlah anak jalanan yang ada di Kabupaten Cirebon pada tahun 2023.

Tabel : 2.1
Jumlah Anak Jalanan Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis kelamin		Total
		L	P	
1	Arjawinangun	2	0	2
2	Astanajapura	10	0	10
3	Babakan	0	0	0
4	Beber	1	0	1
5	Ciledug	3	0	3
6	Ciwaringin	1	0	1
7	Depok	0	0	0
8	Dukupuntang	2	0	2
9	Gebang	0	0	0
10	Gegesik	12	3	15

11	Gempol	0	0	0
12	Grged	0	0	0
13	Gunungjati	0	0	0
14	Jamblang	5	0	5
15	Kaliwedi	10	0	10
16	Kapetakan	14	1	15
17	Karangwareng	0	0	0
18	Karangsembung	0	0	0
19	Kedawung	1	0	1
20	Klangenan	4	0	4
21	Lemahabang	0	0	0
22	Losari	1	0	1
23	Mundu	6	0	6
24	Pabedilan	2	0	2
25	Pabuaran	0	0	0
26	Palimanan	19	3	22
27	Pangenan	1	0	1
28	Panguragan	0	0	0
29	Pasaleman	0	0	0
30	Plered	4	0	4
31	Plumbon	1	0	1
32	Sedong	0	0	0
33	Sumber	2	0	2
34	Suranenggala	0	0	0
35	Susukan	9	0	9
36	Susukanlebak	0	0	0
37	Talun	1	0	1
38	Tengahtani	0	0	0
39	Waled	0	0	0
40	Weru	0	0	0
JUMLAH		111	7	118

Berdasarkan Tabel di atas terlihat masih banyak nya anak jalanan di Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 118 orang dengan laki-laki sebanyak 111 orang dan perempuan sebanyak 7 orang.

Tabel : 2.2
Jumlah Anak Terlantar menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Arjawinangun	75	87	162
2	Astanajapura	97	100	197
3	Babakan	135	110	245
4	Beber	90	71	161
5	Ciledug	137	134	271

6	Ciwaringin	10	12	22
7	Depok	122	97	219
8	Dukupuntang	131	124	255
9	Gebang	101	95	196
10	Gegesik	163	128	291
11	Gempol	103	79	182
12	Greged	67	44	111
13	Gunungjati	162	145	307
14	Jamblang	44	41	85
15	Kaliwedi	124	84	208
16	Kapetakan	194	155	349
17	Karangwareng	55	43	98
18	Karangsembung	74	56	130
19	Kedawung	48	56	104
20	Klangenan	51	55	106
21	Lemahabang	61	63	124
22	Losari	23	27	50
23	Mundu	592	533	1,125
24	Pabedilan	123	102	225
25	Pabuaran	19	43	62
26	Palimanan	104	98	202
27	Panganan	79	55	134
28	Panguragan	17	6	23
29	Pasaleman	75	76	151
30	Plered	47	58	105
31	Plumbon	60	65	125
32	Sedong	89	96	185
33	Sumber	156	142	298
34	Suranenggala	50	52	102
35	Susukan	43	37	80
36	Susukanlebak	84	74	158
37	Talun	123	85	208
38	Tengahtani	82	76	158
39	Waled	132	93	225
40	Weru	50	54	104
JUMLAH		3,992	3,551	7,543

Berdasarkan Tabel di atas terlihat masih banyak nya anak terlantar di Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 7.543 orang dengan laki-laki sebanyak 3.992 orang dan perempuan sebanyak 3.551 orang.

Tabel : 2.3

Jumlah Korban Akibat Bencana menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Arjawinangun	28	38	66
2	Astanajapura	4.198	2.257	6.455
3	Babakan	0	0	0
4	Beber	4	2	6
5	Ciledug	0	0	0
6	Ciwaringin	7	5	12
7	Depok	6	3	9
8	Dukupuntang	15	13	28
9	Gebang	220	340	560
10	Gegesik	18	14	32
11	Gempol	13	10	23
12	Greded	10	8	18
13	Gunungjati	1.839	951	2.790
14	Jamblang	11	12	23
15	Kaliwedi	6	6	12
16	Kapetakan	758	631	1389
17	Karangwareng	0	0	0
18	Karangsembung	14	12	26
19	Kedawung	0	0	0
20	Klangenan	43	36	79
21	Lemahabang	2.095	3.810	5.905
22	Losari	5	4	9
23	Mundu	681	651	1332
24	Pabedilan	0	0	0
25	Pabuaran	35	21	56
26	Palimanan	7	4	11
27	Pangenan	5.105	7.951	13.056
28	Panguragan	94	89	183
29	Pasaleman	0	0	0
30	Plered	0	0	0
31	Plumbon	13	11	24
32	Sedong	6	2	8
33	Sumber	0	0	0
34	Suranenggala	8	5	13
35	Susukan	6	1	7
36	Susukanlebak	5.925	7.751	13.676
37	Talun	3	3	6
38	Tengahtani	116	123	239
39	Waled	1.246	1.101	2.347
40	Weru	0	0	0
JUMLAH		22.535	25.865	48.400

Berdasarkan Tabel di atas terlihat ada Korban Akibat Bencana yang berjumlah sebesar 48.400 orang dengan laki-laki sebanyak 22.535 orang dan perempuan sebanyak 25.865 orang.

Tabel : 2.4

Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Nama LKSA	Jenis Kelamin		Total
			L	P	
1	Pabedilan	An Najah	62	64	126
2	Ciwaringin	Al Hikam	54	36	90
3	Arjawinangun	Al Iklhas	15	35	50
4	Dukupuntang	Al Ishlah	14	26	40
5	Kapetakan	Fajar Hidayah	0	24	24
6	Susukan	Jagat Raya	22	19	41
7	Arjawinangun	Dar Al Tauhid	23	13	36
8	Ciwaringin	Nawa Kartika	0	15	15
9	Waled	Miftahul Ulum	34	21	55
10	Susukan	Raudlatul Mujtahidin	7	33	40
11	Depok	Nurul Hidayah	24	23	47
12	Depok	Sabilul Muttaqin	27	23	50
13	Arjawinangun	Darul Kawakib	56	20	76
14	Plumbon	Darul Furqon	9	12	21
15	Weru	Abu Manshur	15	45	60
16	Dukupuntang	Insan Kamil	38	26	64
17	Greged	Al Mahera	18	10	28
18	Ciwaringin	As Salifie	50	43	93
19	Plumbon	As Shidqy	18	22	40
20	Sumber	Fathatul Hidayah	24	20	44
21	Palimanan	Darussalamah	21	29	50
22	Gempol	Al Ma'rif	82	62	144
23	Ciwaringin	Al Islamy	16	34	50
24	Susukanlebak	Al Musadad	42	17	59
25	Dukupuntang	Al Mawaddah	24	23	47
26	Klangenan	Darul Ulum	17	13	30
27	Panguragan	Babussalam	33	22	55
28	Depok	Karya Mandiri	49	13	62
29	Gebang	Al Muflihin	38	24	62
30	Gunungjati	Al Ikhsan	30	18	48
31	Talun	Al Fanur	13	7	20
32	Kaliwedi	Hidayatul Mubtadi'in	22	28	50
33	Greged	Al Barokah	10	5	15
34	Kedawung	An Niswa	0	18	18
35	Kedawung	Al Hurah	15	0	15
36	Panguragan	An Nahdliyah	24	26	50

JUMLAH		946	869	1.815
--------	--	-----	-----	-------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Cirebon sebesar 1.815.

Berikut adalah Data Jumlah Anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir di Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Tabel : 2.5

Jumlah Anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Tidak Memiliki Akta Lahir			Memiliki Akta Lahir		
		L	P	JUM	L	P	JUM
1	Waled	7.649	7.281	14.93	1.259	1.157	2.416
2	Ciledung	6.548	6.046	12.594	936	899	1835
3	Losari	8.637	8.128	16.765	1.572	1.461	3.033
4	Pabedilan	7.279	6.488	13.767	1.194	1.11	2.304
5	Babakan	9.439	8.854	18.293	1.79	1.677	3.467
6	Karangsembung	5.12	4.755	9.875	735	711	1446
7	Lemahabang	7.881	7.253	15.134	1.137	1.076	2.213
8	Susukanlebak	5.553	5.218	10.771	678	628	1306
9	Sedong	5.903	5.443	11.346	981	898	1879
10	Astanajapura	11.976	11.215	23.191	1.876	1.846	3.722
11	Pangenan	6.41	5.805	12.215	1.086	1.02	2.106
12	Mundu	10.997	10.038	21.035	1.467	1.434	2.901
13	Beber	6.423	5.842	12.265	960	960	1920
14	Talun	9.892	9.221	19.113	1.503	1.372	2.875
15	Sumber	13.563	12.623	26.186	2.365	2.172	4.537
16	Dukupuntang	9.041	8.606	17.647	1.528	1.501	3.029
17	Palimanan	8.877	8.468	17.345	1.572	1.44	3.012
18	Plumbon	10.478	9.526	20.004	1.728	1.6	3.328
19	Weru	9.707	8.921	18.628	1.593	1.492	3.085
20	Kedawung	8.473	7.838	16.311	1.251	1.209	2.46
21	Gunungjati	11.012	10.395	21.407	1.783	1.662	3.445
22	Kapetakan	7.446	6.945	14.391	1.426	1.41	2.836
23	Klangenan	7.234	6.621	13.855	1.272	1.148	2.42
24	Arjawinangun	9.834	9.334	19.168	1.601	1.523	3.124
25	Panguragan	5.905	5.455	11.36	970	954	1924
26	Ciwarengin	4.87	4.762	9.632	818	809	1627
27	Susukan	8.585	8.034	16.619	1.434	1.383	2.817
28	Gegesik	9.257	8.861	18.118	1.551	1.401	2.952
29	Kaliwedi	5.382	5.282	10.664	947	959	1906
30	Gebang	8.595	8.323	16.918	1.561	1.526	3.087
31	Depok	8.718	8.241	16.959	1.519	1.397	2.916
32	Pasaleman	3.76	3.557	7.317	620	622	1242
33	Pabuaran	5.075	4.729	9.804	777	723	1500
34	Karangwareng	3.796	3.455	7.251	636	511	1147

35	Tengahtani	6.286	5.827	12.113	898	862	1760
36	Plered	7.617	7.023	14.64	1.123	1.048	2.171
37	Gempol	6.263	5.619	11.882	1.082	1.007	2.089
38	Greged	8.478	8.06	16.538	1.309	1.346	2.655
39	Suranenggala	5.803	5.45	11.253	1.196	1.149	2.345
40	Jamblang	5.348	5.131	10.479	771	756	1527
JUMLAH		309.11	288.673	597.783	50.606	47.943	98.549

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anak yang memiliki Akte Lahir sebesar 98,549 orang.

2.5 SEKTOR PUBLIK

Dalam bidang politik laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 . Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan ini berarti, bahwa perempuan mempunyai kebebasan dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, Keterlibatan perempuan dalam ranah politik dari masa ke masa semakin meningkat dan ini terlihat dari tingkat partisipasi perempuan yang menjadi anggota legislatif dan partai.

Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.1
Anggota DPR menurut Partai dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

NO.	PARTAI	ANGGOTA DPR		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5=3+4
1	NASDEM	0	0	0
2	PKB	1	0	1
3	PKS	1	0	1
4	PDIP	2	0	2
5	GOLKAR	2	0	2
6	GERINDRA	1	0	1
7	DEMOKRAT	1	0	1
8	PAN	0	0	0
9	PPP	0	0	0
10	HANURA	0	1	1
11	PBB	0	0	0
12	PKPI	0	0	0
JUMLAH		8	1	9

Jika dilihat pada table diatas, keikutsertaan perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Hal ini terjadi karena salah satunya kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan laki-laki.

Tabel : 2.2
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menurut Partai dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

NO.	PARTAI	ANGGOTA DPRD		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5=3+4
1	NASDEM	1	0	1
2	PKB	0	1	1
3	PKS	1	0	1
4	PDIP	2	0	2
5	GOLKAR	2	1	3
6	GERINDRA	1	0	1
7	DEMOKRAT	1	0	1
8	PAN	0	0	0
9	PPP	0	0	0
10	HANURA	1	0	1
11	PBB	0	0	0
12	PKPI	0	0	0
JUMLAH		9	2	11

Begitu juga dengan table diatas, keikutsertaan perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki.

Tabel : 2.3
Anggota DPRD menurut Partai dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

NO.	PARTAI	ANGGOTA DPRD		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5=3+4
1	PDI Perjuangan	8	3	11
2	PKB	7	1	8
3	GERINDRA	4	2	6
4	GOLKAR	4	2	6
5	PKS	4	1	5
6	DEMOKRAT	3	2	5
7	NASDEM	2	2	4
8	HANURA	2	1	3
9	PPP	1	0	1
10	PBB	1	0	1
JUMLAH		36	14	50

Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah laki-laki yang menjadi anggota DPRD lebih banyak dari perempuan. Hal ini terjadi karena salah satunya kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan laki-laki.

Tabel : 2.4
Anggota DPRD menurut Komisi dan Jenis Kelamin
Di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

NO.	KOMISI	ANGGOTA DPRD		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5=3+4
1	KOMISI I	9	2	11
2	KOMISI II	7	4	11
3	KOMISI III	10	2	12
4	KOMISI IV	7	5	12
JUMLAH		33	13	46

Sama halnya seperti tabel sebelumnya laki-laki yang menjadi anggota DPRD lebih banyak dari perempuan.

II.1 Partisipasi di Lembaga Yudikatif

Partisipasi laki-laki dan perempuan di lembaga yudikatif dapat dilihat dari pegawai di kejaksaan, Pengadilan dan Polres kabupaten Cirebon. Hal ini terlihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.5
Jaksa menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

NO	JENIS JABATAN JAKSA	JUMLAH JAKSA		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	FUNGSIONAL	4	9	13
2	STRUKTURAL			
	Eselon I	0	0	0
	Eselon II/a	0	0	0
	Eselon II/b	0	0	0
	Eselon III/a	0	0	0
	Eselon III/b	1	0	1
	Eselon IV	5	0	5
	Eselon V	3	1	4
JUMLAH		13	10	23

Dari tabel diatas, bahwa jumlah pegawai berdasarkan jabatannya di Kejaksaan jumlah laki-laki 13 orang dan perempuan 10 orang. Hal ini sudah seimbang ada kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel : 2.6
Hakim menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Jenis Jabatan Jaksa	Jumlah Hakim		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5=3+4
1	Ketua Pengadilan Negeri	0	1	1
2	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	1	0	1
3	Hakim Pengadilan Negeri	6	3	9
4	Panitera / Sekertaris	1	0	1
5	Wakil Panitera	0	1	1
6	Wakil Sekertaris	1	0	1
7	Panitera Muda	3	0	3
8	Kepala Sub Bagian	2	1	3
9	Panitera Pengganti	9	5	14
10	Jurusita	3	0	3
11	Jurusita Pengganti	5	0	5
JUMLAH		31	11	42

Dari tabel di atas dapat terlihat, bahwa di Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon ada pegawai perempuan sebanyak 11 orang dan laki-laki sebanyak 31 orang ini berdasarkan jabatannya. Berarti sudah seimbangnya antara laki-laki dan perempuan yang berarti ada kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel : 2.7
Jumlah Polisi menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

NO	JENIS JABATAN JAKSA	JUMLAH POLISI		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5=3+4
1	Ajun Komisaris Besar Polisi	1	0	1
2	Komisaris Polisi	10	0	10
3	Ajun Komisaris Polisi	45	1	46
4	Inspektur Satu Polisi	18	2	20
5	Inspektur Dua Polisi	40	3	43
6	Bintara	1.231	76	1.307
JUMLAH		1.345	82	1.427

Berdasarkan jenis kepangkatannya dan jenis kelamin, bahwa jumlah pegawai di kepolisian sebanyak 1.345 orang laki-laki dan 82 orang perempuan,

Jumlahnya cukup tidak seimbang kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan di kepolisian.

II.3 Partisipasi di Lembaga Eksekutif

Partisipasi di lembaga Eksekutif dapat terlihat dari kedudukan PNS dijabatan struktural dan jabatan fungsional seperti tabel berikut ini :

Tabel : 2.8

**Jumlah PNS Pusat menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023**

NO	JENIS KEPANGKATAN	JUMLAH PNS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5=3+4
1	Fungsional Umum	2.164	674	2.838
2	Fungsional Tertentu	5.011	6.424	11.435
3	Esselton I	0	0	0
4	Esselton II	35	2	37
5	Esselton III	204	33	237
6	Esselton IV	659	249	908
7	Esselton V	0	0	0
J u m l a h		8.073	7.382	15.455

Berdasarkan tabel diatas pada tingkatan eselon II, III dan IV terdapat ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Di Lembaga Eksekutif dapat juga dilihat dari PNS berdasarkan Golongan ruang dan jenis kelamin seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel : 2.9

**Jumlah PNS Pusat menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023**

NO	GOLONGAN RUANG KEPANGKATAN PNS	JUMLAH PNS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5=3+4
1	Golongan I			122
2	I-a	6	0	6
3	I-b	15	1	16
4	I-c	85	4	89
5	I-d	10	1	11
6	Golongan I			2.157
7	II-a	278	46	324
8	II-b	525	98	623

9	II-c	539	271	810
10	II-d	162	238	400
11	Golongan III			6.312
12	III-a	857	1.387	2.244
13	III-b	680	680	1360
14	III-c	611	600	1211
15	III-d	805	692	1497
16	Golongan IV			6.879
17	IV-a	2.668	2.659	5327
18	IV-b	762	694	1456
19	IV-c	82	13	95
20	IV-d	1	0	1
21	IV-e	0	0	0
Jumlah		8.086	7.384	15.470

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah PNS berdasarkan golongan dan jenis kelamin sudah seimbang antara laki-laki dan perempuan yaitu 8.086 orang laki-laki dan 7.384 orang perempuan. Jumlah PNS di pemerintahan Kabupaten Cirebon seluruhnya berjumlah 15.470 orang.

Pada Lembaga Eksekutif juga dapat dilihat pada jumlah camat berdasarkan jenis kelamin seperti terlihat dari pada tabel di bawah ini :

Tabel : 2.10

**Jumlah Camat menurut Jenis kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2016**

NO	JENIS KEPANGKATAN	JUMLAH PNS		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kabupaten Cirebon	38	2	40

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah camat berdasarkan jenis kelamin laki-laki masih medominasi dari jumlah kecamatan 38, hanya 2 perempuan yang menjadi camat.

Tabel : 2.11

**Jumlah Kepala Desa menurut Jenis kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Arjawanangun	11	0	11
2	Astanajapura	8	3	11
3	Babakan	13	1	14
4	Beber	10	0	10

5	Ciledug	10	0	10
6	Ciwariningin	6	2	8
7	Depok	12	0	12
8	Dukupuntang	11	2	13
9	Gebang	13	0	13
10	Gegesik	13	1	14
11	Gempol	8	0	8
12	Greged	10	0	10
13	Gunungjati	15	0	15
14	Jamblang	6	2	8
15	Kaliwedi	9	0	9
16	Kapetakan	4	5	9
17	Karangwareng	8	1	9
18	Karangsembung	7	1	8
19	Kedawung	8	0	8
20	Klangenan	9	0	9
21	Lemahabang	13	0	13
22	Losari	10	0	10
23	Mundu	12	0	12
24	Pabedian	12	1	13
25	Pabuaran	7	0	7
26	Palimanan	10	2	12
27	Pangenan	9	0	9
28	Panguragan	7	2	9
29	Pasaleman	7	0	7
30	Plered	10	0	10
31	Plumbon	14	1	15
32	Sedong	9	1	10
33	Sumber	2	0	2
34	Suranenggala	9	0	9
35	Susukan	12	0	12
36	Susukanlebak	13	0	13
37	Talun	11	0	11
38	Tengahtani	8	0	8
39	Waled	11	1	12
40	Weru	9	0	9
JUMLAH		386	26	412

Berdasarkan tabel di atas terlihat jumlah Kepala Desa berdasarkan jenis kelamin laki-laki masih medominasi dari jumlah kecamatan 386, hanya 26 perempuan yang menjadi Kepala Desa.

Tabel : 2.12
Pengurus Partai Politik menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Partai Politik	DPC		
		L	P	L+P
1	PDI-P	17	2	19
2	DEMOKRAT	26	8	34
3	PKB	77	11	88
4	GOLKAR	37	14	51
5	PKS	12	4	16
6	HANURA	19	8	27
7	PPRN	10	6	16
8	GERINDRA	11	6	17
9	PBB	21	9	30
JUMLAH		230	68	298

II.4 Keanggotaan LPMD di Kabupaten Cirebon

Keanggotaan LPMD di Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 6.13
Keanggotaan LPMD di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Arjawinangun	115	12	127
2	Astanajapura	112	15	127
3	Babakan	150	20	170
4	Beber	95	16	111
5	Ciledug	99	12	111
6	Ciwarisingin	80	5	85
7	Depok	116	24	140
8	Dukupuntang	118	27	145
9	Gebang	122	14	136
10	Gegesik	88	11	99
11	Gempol	103	11	114
12	Greged	142	11	153
13	Gunungjati	86	15	101
14	Jamblang	85	15	100
15	Kaliwedi	90	18	108
16	Kapetakan	97	12	109
17	Karangwareng	85	11	96
18	Karangsembung	84	19	103
19	Kedawung	53	11	64
20	Klangenan	97	13	110

21	Lemahabang	94	21	115
22	Losari	107	11	118
23	Mundu	131	18	149
24	Pabedilan	72	16	88
25	Pabuaran	122	10	132
26	Palimanan	105	30	135
27	Pangenan	96	15	111
28	Panguragan	62	8	70
29	Pasaleman	100	10	110
30	Plered	156	8	164
31	Plumbon	94	22	116
32	Sedong	170	21	191
33	Sumber	91	23	114
34	Suranenggala	110	11	121
35	Susukan	103	11	114
36	Susukanlebak	113	25	138
37	Talun	87	18	105
38	Tengahtani	119	8	127
39	Waled	120	21	141
40	Weru	90	13	103
JUMLAH		4.159	612	4.771

Mayoritas Keanggotaan LPMD di masing-masing kecamatan masih di dominasi oleh laki-laki bila di bandingkan dengan kaum perempuan, berarti masih terjadi kesenjangan gender. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) tentu menuntut adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sehingga peranan keduanya dapat saling melengkapi dalam mewujudkan sasaran pembangunan.

BAB III

RENCANA AKSI

3.1. ISU STRATEGIS

a. Bidang Pendidikan

Isu gender di bidang pendidikan meliputi :

- Masih ada ketimpangan buta huruf dimana persentase perempuan yang tidak bisa membaca menulis mencapai 11,00%. Persentase penurunannya dari tahun 2015 ke tahun 2016 juga terdapat ketimpangan dimana perempuan hanya 8,00 % sedangkan laki-laki mencapai 13,00%. Sebaran kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kec. Ciledug, Mundu, Gegesik, Panguragan, Kaliwedi, Gebang, Pasaleman, Pabuaran dan Suranenggala merupakan sembilan tertinggi persentase buta huruf. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pendidikan dasar di Kabupaten Cirebon masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
- Rasio angka partisipasi murni anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar dan menengah sudah setara, sehingga prioritas harus diberikan pada kualitas pendidikan untuk keduanya.
- Kecenderungan peningkatan angka putus sekolah bagi anak laki-laki terjadi pada jenjang pendidikan menengah yaitu usia 13-15 tahun dan 15-17 tahun, dan jenjang pendidikan tinggi usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016. Angka putus sekolah pada anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Ini terjadi di Kecamatan Mundu dan Gebang Kabupaten Cirebon. Hal utama karena tuntutan ekonomi keluarga yang mengharuskan anak laki-laki untuk terlibat dalam membantu mengatasi masalah ekonomi keluarga.
- Rasio angka partisipasi laki-laki di pendidikan tinggi (D I, II, III) lebih rendah dibandingkan perempuan, dan pada tingkat D IV, S1 , S2 laki-laki lebih tinggi : 6,19 % dibandingkan perempuan : 5,09 %. Hal ini menunjukkan bahwa ketika memasuki jenjang pendidikan tinggi (D IV, S1, S2), ada kecenderungan orang tua lebih memilih laki-laki untuk tetap melanjutkan pendidikannya dibandingkan dengan anak perempuan. Kondisi ini bisa saja terjadi karena masih adanya anggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah di dalam keluarga.
- Masih adanya ketimpangan ketersediaaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang berkualitas, antara daerah perkotaan dengan

perdesaan (terpencil), dan pulau-pulau. Hal ini juga yang berpengaruh terhadap ketimpangan kualitas pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Isu gender di bidang kesehatan meliputi :

- Angka kematian Bayi dan balita masih cukup tinggi antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan ibu ttg nutrisi dan kehamilan, kurangnya pendidikan ibu dan orangtua, dan Faktor utama dari semuanya ini adalah kemiskinan. Data tahun 2015 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, menunjukkan bahwa jumlah Angka Harapan Hidup sebesar 70,47.
- Angka Kematian Ibu masih cukup tinggi yaitu 49 org dari 100.000 kelahiran hidup, yang antara lain disebabkan terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan dimana perempuan biasanya menunggu suami/orangtua untuk ambil keputusan; kurangnya sarana transportasi dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan serta terlalu sering melahirkan, terlalu muda untuk melahirkan, dan budaya patriarki.
- Isteri/perempuan rentan dan seringkali menjadi korban pasangannya di dalam penyebaran HIV AIDS dan penyakit menular lainnya di dalam rumah tangga yang akan berdampak pula terhadap anak yang dikandung. Selain itu, kurangnya akses perempuan dibandingkan laki-laki terhadap bahaya HIV AIDS, juga berkontribusi terhadap kerentanan bagi istri/perempuan.
- Kelembagaan HIV AIDS di semua kabupaten kota belum berfungsi secara optimal, khususnya dalam menyediakan data dan pelayanan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang terinveksi dan rentan terinveksi HIV AIDS

c. Bidang Ekonomi

Isu gender di bidang ekonomi, meliputi :

- Perkembangan informasi global berpengaruh pada pembuka wawasan dan pengetahuan masyarakat untuk dapat memperbaiki taraf kehidupan dan memperoleh pendapatan lebih dengan cara yang mudah dan cepat. Salah satunya dengan bekerja di luar negeri menjadi tenaga migrant. Pada kenyataannya penempatan TKI di luar masih banyak menemui masalah diantaranya, menyangkut perlindungan dan penempatan TKI. Tenaga kerja

Indonesia paling besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 6.150 orang dibandingkan laki-laki sebanyak 331 orang.

- Dibidang Ekonomi terdapat pekerja profesional yang terdiri dari Akuntan, Konsultan, Arsitek, Manager dan Insinyur. Untuk kelompok profesi di bidang ekonomi yang jumlahnya lebih besar yaitu profesi Akuntan sebanyak 8 orang yang terdiri dari 8 laki-laki.
- Dalam mendukung perluasan lapangan kerja, masyarakat yang bergerak di usaha mikro khususnya perempuan, sering menghadapi kendala dalam mengakses permodalan. Berbagai persyaratan lembaga perbankan atau lembaga kredit, menyebabkan kelompok usaha kecil sering menjadi kendala yang utama. Padahal seperti diketahui mikro berperanan cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja melalui penciptaan lapangan pekerjaan, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah, serta mengatasi masalah kemiskinan. Disamping itu, usaha mikro juga merupakan salah satu komponen utama pengembangan ekonomi lokal, dan berpotensi meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) perempuan dalam keluarga.
- Masih lemahnya perlindungan bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja perempuan. Misalnya penerapan hak cuti haid dan melahirkan yang masih sering menjadi persoalan bagi buruh perempuan. Beberapa perusahaan menerapkan aturan, ketika seorang pekerja perempuan menikah, maka dia harus berhenti bekerja. Begitu juga **hak cuti haid**, sebagian besar pekerja perempuan tidak bisa mendapatkan hak tersebut karena alas an perusahaan tempat mereka bekerja yang kurang respon.
- Masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro masih mengalami kesulitan dalam mengakses pasar (pemasaran hasil produksinya). Kelompok usaha mikro harus diperhadapkan dengan kekuatan pemilik modal yang memiliki kemampuan mengakses pasar yang lebih luas. Kondisi ini yang kadang membuat usaha mikro kurang mampu berkembang.
- Kontrol penerapan standar Upah Minimum Provinsi yang belum maksimal. Beberapa tempat kerja masih menerapkan gaji/upah di bawah UMP.
- Terdapat diskriminasi upah bagi perempuan, dimana upah pekerja laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Ini terjadi di jenjang pendidikan SD-SMA, baik di perkotaan maupun di perdesaan.

- Kemiskinan menjadi penyebab utama rawannya perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Belum lagi persoalan akses pendidikan yang timpang antara laki-laki dan perempuan.
- Ketersediaan sumberdaya yang semakin terbatas di pedesaan menjadi masalah bagi perempuan untuk mengakses lapangan kerja. Mereka semakin terpinggirkan dengan penerapan pola pertanian yang semakin berwajah “laki-laki”. Sehingga bagi perempuan, dengan iming-iming pekerjaan yang dapat memberikan gaji tinggi yang cukup menggiurkan, menyebabkan tidak sedikit dari mereka, terjebak dal dalam praktik perdagangan orang atau *trafficking*.
- Maraknya praktik trafficking didukung oleh lemahnya sistem pengendalian hukum pada semua tingkatan, mulai dari desa sampai dengan provinsi termasuk dalam hal ini petugas imigrasi. Penerapan Perda Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disahkan pada Tahun 2018 belum bisa diterapkan secara maksimal sampai di tingkat Kecamatan dan Desa.
- Perencanaan pengentasan kemiskinan belum menggunakan analisis gender, masih netral gender.

d. Bidang Publik

Isu gender di bidang publik, meliputi :

- Terdapat ketimpangan proporsi pejabat eksekutif perempuan dan laki-laki, khususnya pada eselon II, III dan IV, yang persentasenya baru 21,6% perempuan. Pada eselon III laki-laki mencapai sudah mencapai 83% sedangkan perempuan baru 17%. Demikian juga pada eselon II, perempuan baru 6% sedangkan laki-laki sudah mencapai 94%.
- Keterwakilan perempuan di legislatif sudah mencapai 30%.
- Akses dan kontrol masyarakat miskin dan kelompok marginal khususnya perempuan dalam proses perencanaan penganggaran yang masih rendah
- Fungsi dan Peran POKJA PUG yang belum optimal
- Akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan perencanaan sangat terbatas

e. Kekerasan Perempuan dan Anak

Isu gender di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi :

- Tindak kekerasan terhadap perempuan banyak di tingkat pendidikan SD/Sederjat yang selanjutnya diikuti oleh di tingkat pendidikan Belum Tamat SD dan SMA/Sederajat artinya baik dilihat dari aspek pendidikan maupun aspek umur tindak kekerasan pada perempuan banyak dialami oleh anak-anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah mereka yang berusia 0-18 tahun kurang 1 hari dan mempunyai 32 hak anak yang harus diberikan.
- Faktor ekonomi merupakan salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan. Banyak faktor di lapangan tindak kekerasan menimpa kaum istri, anak-anak yang keduanya adalah golongan lemah yang seharusnya mendapatkan perlindungan.
- Pelayanan yang diberikan oleh lembaga/ institusi sesuai dengan SPM, untuk lembaga/Institusi selain kejaksaan memberikan pelayanan sejak adanya pengadaan sampai dengan saatnya reintegrasi karena baik banati, kepolisian maupun P2TP2A merupakan institusi yang berada di garda terdepan.
- Masih adanya diskriminasi bagi perempuan pekerja khususnya di perusahaan, terkait hak cuti haid dan melahirkan

3.2. TUJUAN

Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Cirebon ditujukan untuk percepatan pencapaian SDGs (Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan , Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua. , Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. , Menurunkan Angka Kematian Anak , Meningkatkan Kesehatan Ibu , Memerangi HIV AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya , dan Pelestarian Lingkungan), sesuai isu strategis di setiap tujuan.

3.3. SASARAN

Rencana Aksi PUG Kabupaten Cirebon disusun untuk mencapai target sasaran :

- Mendorong implementasi perundang-undangan yang berperspektif gender di Kabupaten Cirebon
- Memperkuat jaringan kelembagaan pengarustamaan gender termasuk keterpaduan program dan kegiatan di Kabupaten Cirebon.
- Memperkuat komitmen penganggaran yang responsif gender di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Cirebon.

- Peningkatan kemampuan mengintegrasikan isu gender dalam program/ kegiatan di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Cirebon.
- Tersedianya Statistik Gender dan Anak di Kabupaten Cirebon.
- Pelaksanaan PUG dalam pembangunan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di SKPD/lembaga pemerintah/non pemerintah di Kabupaten Cirebon.

Sasaran subyek/ pemangku kepentingan dari rencana aksi PUG Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Eksekutif, yang terdiri dari Pejabat pemerintahan meliputi penentu kebijakan di provinsi, dan Kab/Kota, Seluruh SKPD (khususnya eselon III dan IV) baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Legislatif di Kabupaten Cirebon.
- c. Yudikasi, yaitu semua unsur penegak hukum termasuk para aparat penegak hukum dan masyarakat (perempuan dan laki-laki)
- d. Kelompok masyarakat diantaranya Tokoh agama, Tokoh adat, aktifis pemuda dan perempuan

3.4. KEBIJAKAN

Tugas pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang responsif gender melalui : 1) Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan, 2) Penguatan kelembagaan PUG dan anak, 3) Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, 4) Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, 5) Optimalisasi kebijakan kesejahteraan rakyat daerah, 6) Semua program SKPD yang memberikan pelayanan (service point) kepada masyarakat (laki-laki dan perempuan).

Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif gender mengacu pada dasar hukum yaitu :

- 1) UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 2) UU.No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 3) UU.No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4) UU.No.17 tentang Keuangan Negara, UU.No.1 tentang Perbendaharaan Negara, UU.No.1 tentang Pemeriksaan, Pengendalian dan Tanggung.Jawab.Keuangan Negara.
- 5) PP.No.20/21 tentang RKP dan RKA-KL

- 6) PP.No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 7) PP.No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Pertangung jawaban keuangan dan kinerja.
- 8) Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.
- 9) Kepmendagri.No.132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam pembangunan di daerah.
- 10) Permendagri.No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Surat Mendagri. No.411/1254/SJ 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Program PP dan PUG di Daerah.
- 12) SEB.Men.PPN/Ka.Bappenas dan Mendagri.No.1354/M.PPN/03/2004 dan No.050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Partisipatif daerah .

Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019 diarahkan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender adalah : 1) Peningkatan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menikmati pendidikan disemua jenjang, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang tinggi menuju terciptanya kesetaraan dan keadilan gender; 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ikut menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta peran serta masyarakat dalam menjaga kesehatan reproduksi termasuk dalam keluarga berencana; 3) Peningkatan akses kaum perempuan untuk berusaha di bidang ekonomi produktif, termasuk mendapatkan modal pelatihan usaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi pasar sehingga dapat mendorong lahirnya kemandirian kaum perempuan dalam berwirausaha; 4) Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan, sehingga tercipta keseimbangan perempuan diberbagai sektor; 5) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mencegah terjadinya diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan bahkan tindak perdagangan perempuan dan anak (trafikking) yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip keterpaduan dan keseimbangan.

3.5. STRATEGI

Strategi pengarusutamaan gender diimplementasikan pada seluruh tahap pembangunan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan. Implementasi pada tahap perencanaan pembangunan melalui : 1) Penguatan prasyarat yang terdiri dari 7 aspek yaitu dukungan politik, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, sistem data dan informasi, alat analisis serta dukungan masyarakat sipil; 2) Sektor/Lembaga menyusun RKA/KL di mana menggunakan data terpilah, melalui proses musrenbang, dan melewati tahapan analisis gender; 3) Bappelitbangda Kabupaten menyusun tolok ukur dan indikator kinerja ;4) Adanya komitmen dalam menggoalkan anggaran.

Implementasi PUG pada tahap pelaksanaan pembangunan adalah :

- 1) Memastikan fungsi managemen pelaksanaan pembangunan yang responsif gender melalui koordinasi, sinkronisasi, sinergistik,bimbingan teknis dan supervisi;
- 2) Tidak ada kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program yang responsif gender ditinjau dari aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Implementasi PUG pada tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan adalah 1) sektor/lembaga melaporkan tentang pelaksanaan pembangunan yang responsif gender (LAKIP) sesuai PP No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Menpan/LAN tentang kinerja aparatur; BPKP untuk akuntabilitas ; Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bappelitbangda dan DPPKBP3A; 2) DPPKBP3A melakukan analisis format LAKIP sesuai PP No.8/2006 melaporkannya kepada Sektor/Lembaga sebagai *feed back* dan kepada Gubernur sebagai bentuk akuntabilitas; 3) Membuat tambahan format LAKIP baru sesuai tolok ukur/indikator kinerja yang responsif gender.